

Peran ASEAN Dalam Upaya Kontra Terorisme di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2017-2020

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Muhamad Fadhli Rahman

18323214

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

Peran ASEAN Dalam Upaya Kontra Terorisme di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2017-2020

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Muhamad Fadhli Rahman

18323214

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul

**Peran ASEAN Dalam Upaya Kontra Terorisme di
Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2017-2020**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Untuk Memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Nama Ketua Prodi



(Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji

1. Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.
2. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
3. Wahyu Arif Raharjo, S.I.P., M.I.R.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 15 Mei 2022



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and flourishes.

Muhamad Fadhli Rahman

DAFTAR ISI

Peran ASEAN Dalam Upaya Kontra Terorisme di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2017-2020	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR	3
DAFTAR SINGKATAN	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Cakupan penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Landasan Teori	14
1.7 Argumen Sementara	17
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	18
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.8.4 Proses Penelitian.....	18
1.9 Sistematika Penulisan	19
BAB II	20
Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara	20
2.1 Sejarah Terorisme di Asia Tenggara.....	20
2.2 Aksi Terorisme di Asia Tenggara.....	20
2.2.1 Perang Marawi di Filipina.....	23
2.2.2 Bom Surabaya di Indonesia.....	27
2.2.3 Bom Jolo di Filipina.....	30
BAB III	32
Peran Kontra Terorisme ASEAN di Kawasan Asia Tenggara	32
3.1 ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM).....	34

3.2 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC).....	40
3.3 Our Eyes Initiative (OEI).....	44
3.4 ASEAN Regional Forum (ARF).....	49
3.5 ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)	52
3.6 Analisis.....	53
BAB IV	56
2.1 Kesimpulan	56
2.2 Rekomendasi	57
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR

Tabel 1. Indeks Kasus Terorisme Negara ASEAN Tahun 2017-2020	53
--	----

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i>
IGO	: <i>International Governmental Organization</i>
JAD	: <i>Jamaah Ansharut Daulah</i>
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
ARF	: <i>ASEAN Regional Forum</i>
ADMM	: <i>ASEAN Defence Ministers Meeting</i>
ACCT	: <i>ASEAN Convention on Counter-Terrorism</i>
OEI	: <i>Our Eyes Initiative</i>
AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
EWG	: <i>Expert Working Group</i>
APSC	: <i>ASEAN Political-Security Community</i>
ASLOM	: <i>ASEAN Senior Legal Official Meeting</i>
PCRVE	: <i>Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism</i>
POA	: <i>Plan of Action</i>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis peran ASEAN dalam upaya kontra terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Setelah terjadinya peristiwa 9/11 membuat terorisme menjadi ancaman bagi negara didunia. Lalu, adanya kekalahan kelompok terorisme di Kawasan Timur Tengah menjadi alasan yang kuat bahwa negara-negara anggota ASEAN harus berbenah didalam hal keamanan dengan tujuan pencegahan ancaman terorisme. Kemudian, teori fungsionalisme digunakan untuk melihat bagaimana peran ASEAN dalam upayanya membantu negara anggotanya dalam memenuhi kebutuhan manusianya yang salah satunya adalah adanya situasi negara dan kawasan yang aman dan damai. Peran ASEAN disini adalah sebagai narahubung demi terlaksananya upaya kontra terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data didapatkan melalui internet dan nantinya akan digunakan untuk menjelaskan terkait peran ASEAN sebagai organisasi regional yang berkorelasi dengan teori fungsionalisme.

Kata Kunci: ASEAN, ADMM, OEI, ARF, AMMTC, ACCT, ISIS, Perang Marawi, Bom Surabaya, Bom Jolo, Kontra Terorisme ASEAN.

Abstract

This study aims to analyze the role of ASEAN in counter-terrorism efforts in the Southeast Asian Region. After the events of 9/11, terrorism became a threat to countries in the world. Then, the defeat of terrorist groups in the Middle East is a strong reason that ASEAN member countries must improve in terms of security with the aim of preventing the threat of terrorism. Then, functionalism theory is used to see how the role of ASEAN in its efforts to assist its member countries in meeting their human needs, one of which is the existence of a safe and peaceful state and region situation. ASEAN's role here is as a liaison for the implementation of counter-terrorism efforts. This study uses qualitative research methods, where data collection is obtained via the internet and will later be used to explain the role of ASEAN as a regional organization that is correlated with functionalism theory.

Keywords: ASEAN, ADMM, OEI, ARF, AMMTC, ACCT, ISIS Marawi War, Surabaya Bombing, Jolo Bombing, ASEAN Counter Terrorism

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setelah berakhirnya Perang Dingin, konsep keamanan mulai berubah. Meskipun keamanan masih merupakan bentuk keamanan tradisional selama atau sebelum Perang Dingin, keamanan saat ini telah menjadi sebuah istilah yang tidak konvensional. Dalam konsep keamanan yang tidak konvensional dapat dilihat bahwa negara tidak lagi menjadi titik fokus dari keamanan. Aktor non-negara seperti organisasi internasional (NGO & IGO), organisasi teroris bahkan individu telah dimasukkan dalam konsep keamanan non-tradisional. Berbagai aspek keamanan non-tradisional telah banyak dipertimbangkan, dikarenakan mereka mengancam keamanan nasional dan keamanan wilayah tertentu (Sarwono, S.W, 2012).

Berbagai persoalan keamanan non-tradisional dianggap mengancam keamanan nasional dan keamanan wilayah tertentu. Hal ini disebabkan menyatunya batas-batas negara, sehingga memudahkan masyarakat untuk berpindah dari satu negara ke negara lain. Oleh karena hal tersebut menjadi penting pasalnya untuk membahas masalah terorisme. Banyak aksi terorisme sekarang ini memiliki motif yang berbeda untuk mencapai tujuannya seperti sosialisme, nasionalisme, ekstremisme agama atau eksklusivitas. Peristiwa 11 September 2001 atau runtuhnya gedung World Trade Center AS menjadi peringatan kepada seluruh negara didunia terhadap tindakan terorisme bahwa negara sebesar Amerika Serikat tak luput dari tindakan terorisme. Amerika Serikat meyakini bahwa peristiwa ini diprakarsai oleh Al Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden yang sering

melakukan pembajakan atau serangan bom, yang mengakibatkan tewasnya tentara Amerika (Burke, J., 2011). Peristiwa 9/11 di Amerika Serikat seringkali bertanya kepada banyak orang mengapa gedung-gedung diserang teroris dan mengapa ada ledakan yang menghancurkan gedung-gedung dengan pesawat terbang dan bom. Media elektronik melaporkan bahwa insiden itu disebabkan oleh organisasi teroris, yang awalnya membajak 4 pesawat komersial Amerika. Dua jam kemudian, dua pesawat menabrak dua menara kembar World Trade Center, dan pesawat ketiga menabrak Pentagon di Arlington, Virginia. Pesawat keempat yang hendak menjemput penumpang jatuh di Shanksville, Pennsylvania, asalnya ke Washington, DC.

Terorisme menjadi suatu hal yang penting setelah terjadinya peristiwa 9/11. Operasi kontra terorisme yang dilakukan oleh Presiden Bush telah membuat Kawasan Asia Tenggara sebagai “front kedua” setelah Afghanistan. Ada berbagai minoritas Islam di Asia Tenggara, dan ambisi mereka seringkali sangat kuat. Di Indonesia, masalah terorisme juga terjadi dengan adanya beberapa peristiwa pengeboman seperti di Bali 1 dan 2, pengeboman Hotel JW Marriott, hingga pengeboman yang terjadi pada pusat ibukota yaitu bom Thamrin. Salah satu pendahulunya tidak dapat disangkal bahwa ada jaringan teroris yang terbentuk dan saling berhubungan (Silber, M. D., 2011).

Pada tahun 2017 peristiwa serangan terorisme besar juga terjadi pada negara Filipina tepatnya di kota Marawi atau biasa disebut juga Perang Marawi. Pada peristiwa ini kelompok terorisme ISIS melakukan Kerjasama dengan kelompok terorisme lain seperti JAD, Maute Group dan lainnya. Filipina Selatan menjadi wilayah yang dipilih sebagai wilayah basis kelompok ISIS dengan membuat segala

bentuk infrastruktur pendukung seperti salah satunya basis militer. ISIS dan para kelompok pendukungnya kemudian melakukan serangkaian tindak terorisme seperti melawan militer, melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal di daerah perairan Filipina Selatan dengan tujuan mengambil alih kekuasaan kota Marawi (Wijaya., 2019). Negara-negara anggota ASEAN seperti Brunei, Indonesia, Kamboja, Malaysia dan Singapura merespon kejadian tersebut dengan berbagai cara tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu peningkatan kewaspadaan dan menekan terjadinya tindakan teror. Malaysia mengambil tindakan menekan digunakannya *Army Deployment Force* yang bertujuan menciptakan situasi yang lebih kondusif. Kemudian Thailand yang meningkatkan peran militer di seluruh wilayahnya (Wijaya., 2019).

Tidak berhenti sampai pada tahun 2017 saja tindak kejahatan terorisme masih kerap terjadi dan bahkan meluas di Kawasan Asia Tenggara khususnya di negara anggota ASEAN. Peristiwa terorisme seperti Bom Surabaya di Indonesia pada tahun 2018 dan Bom Jolo di Filipina pada tahun 2020 menjadi sebuah bukti bahwa tindak terorisme masih terus berkembang di negara anggota ASEAN.

Beberapa upaya telah kontra terorisme sebenarnya telah dilakukan oleh ASEAN dengan tujuan melawan aksi terorisme dalam proses pembangunan kawasan. Salah satu Langkah ASEAN adalah dengan mendirikan forum yang bertujuan untuk berbagi informasi terkait dengan ancaman teroris antar negara yang disebut ASEAN Regional Forum (ARF). ARF berfungsi untuk berkontribusi pada pembentukan jaringan dan berbagi informasi (Bangun., 2019). Selain itu, ASEAN juga sepakat untuk membentuk kelompok kerja yang disebut *Inter- Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* untuk mempromosikan

kerja sama di Forum Regional ASEAN dalam memerangi terorisme. Untuk memperkuat kerja sama, ASEAN juga merumuskan dan menandatangani Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ACCT, pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu)-Filipina, 13 Januari 2007 untuk mencegah dan memerangi terorisme (Namora., 2016).

Pada tahun 2017 ASEAN juga membuat suatu program yang bernama ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM). Guna mencegah serangan teroris menyusup ke negara-negara ASEAN, beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Filipina, serta Indonesia mengadakan pertemuan di akhir tahun 2017 untuk membahas peningkatan jumlah serangan teroris di Asia Tenggara dan ancaman yang ditimbulkan oleh para kelompok teroris. Pertemuan ADMM tahun 2017 bertempat di manila dan pada pertemuan ini membahas kasus terorisme pada periode tersebut (Winarto & Sudirman., 2021). Selain itu pada pertemuan itu juga sebagai ajang menumbuhkan Kerjasama yang bernama *Our Eyes Initiative* (OEI).

Dengan dibentuknya berbagai forum-forum tersebut merupakan bentuk upaya ASEAN dalam mengatasi isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Namun tak bisa dipungkiri bahwa peristiwa tindak terorisme masih terus terjadi bahkan meluas. Dimana seharusnya ASEAN sebagai organisasi di kawasan yang mempunyai kewajiban dan memegang peranan penting harusnya dapat memberikan perlindungan dalam hal keamanan berbagai negara anggotanya. Oleh karena itu, peneliti disini ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan peran ASEAN dalam menyelesaikan masalah terorisme di kawasannya guna meningkatkan keamanan nasionalnya.

Sebagai organisasi internasional yang memiliki reputasi tinggi dalam hubungan antar negara di kawasan, ASEAN dapat dikatakan sebagai pelindung bagi para anggotanya. ASEAN juga merupakan jembatan antara negara-negara Asia Tenggara atau hubungan dengan negara lain. Pembentukan ASEAN telah dipertimbangkan oleh banyak negara anggota. ASEAN didirikan atas dasar tiga prinsip dasar, yaitu: tidak mencampuri urusan negara anggota lainnya ASEAN atau soft regionalism. Hal ini menjadi kendala bagi ASEAN untuk segera menyelesaikan setiap permasalahan di Asia Tenggara. Peneliti harus mengkaji peran ASEAN dari perspektif Amerika Serikat, dengan menyebutkan bahwa Asia Tenggara adalah tempat berkembang biaknya terorisme dan pembatasan ASEAN terhadap partisipasi anggotanya dalam terorisme. Oleh karena itu, peran ASEAN sangat dibutuhkan di sini, begitu juga dalam kasus terorisme. ASEAN menunjukkan aktivitasnya sebagai organisasi regional yang dapat mengatasi masalah terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti menyadari betapa pentingnya dan sangat urgensi terkait isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini bukan hanya mengancam beberapa pihak atau negara tertentu saja, namun juga seluruh negara di kawasan regional ASEAN dan seluruh warga yang ada di dalamnya (Cipto., 2007). Dengan demikian, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian terkait dengan bagaimanakah langkah kontra terorisme ASEAN dalam mengatasi isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara, khususnya pada tahun 2017-2020.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana peran ASEAN dalam mengatasi isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2017-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui lebih lanjut terkait peran yang dilakukan oleh ASEAN dalam membantu negara anggotanya mengatasi isu terorisme di kawasan khususnya pada tahun 2017-2020.

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini berfokus membahas tentang bagaimana upaya ASEAN yang dalam menangani isu terkait terorisme di negara-negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Kemudian, alasan peneliti mengambil tahun 2017-2020 karena melihat kondisi Asia Tenggara saat itu sedang dipenuhi ancaman terorisme dan menjadi pembahasan yang hangat. ISIS bersama para kelompok pendukungnya seperti kelompok Jihadis, kelompok Abu Sayyaf, JAD, Maute Group, dan kelompok terorisme lainnya mulai melebarkan sayapnya ke wilayah Asia Tenggara (Wijaya., 2019). ISIS dan para kelompok pendukungnya kemudian melakukan serangkaian tindak terorisme seperti melawan militer, melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal di daerah perairan Filipina Selatan dengan tujuan untuk mengambil alih kekuasaan kota Marawi (Nainggolan., 2017). Selain itu, pada tahun 2018 terjadi peristiwa serangan terorisme di Indonesia yang bernama Bom Surabaya. Pada tahun 2020 pengeboman terhadap gereja Jolo di Filipina juga terjadi. Serangkain peristiwa tersebut menjadi alasan peneliti mengambil rentang tahun 2017-2020.

1.5 Tinjauan Pustaka

Guna menyelaraskan gagasan, buah pikiran, ataupun alur dari penelitian kali ini. Peneliti membangun sebuah kerangka berpikir dan meninjau kembali sumber-sumber penelitian yang sebelumnya telah dipublikasikan sebelumnya. Pertama, peneliti menggunakan artikel dengan judul *Penanggulangan Terorisme di ASEAN Melalui Our Eyes Initiatives: Studi Mengenai Cooperative Security* yang ditulis oleh Prisilla Oktaviani Winarto dan Arfin Sudirman pada 2021 menyebutkan bahwa ASEAN sebagai pemegang otoritas tinggi memiliki kontrol terhadap negara-negara di Asia Tenggara, melakukan kerja sama untuk memecahkan masalah atau masalah mendesak yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara. Dimana, forum setingkat ASEAN diharapkan dapat memberikan Langkah aktif dalam mengurangi kemungkinan adanya ancaman dalam mengatasi masalah terorisme yang sedang kerap terjadi (Winarto & Sudirman., 2021). organisasi-organisasi ASEAN bekerja sama, yaitu dengan pengenalan "Konvensi Anti-Terrorisme Asia", kemudian diimplementasikan dalam kebijakan nasional berbagai negara anggota, dan kerja sama "Our Eyes" bertukar informasi strategis untuk mengatasi masalah nasional mereka yaitu terorisme dan radikalisme. Namun, terdapat kekurangan dari jurnal ini yang tidak menjawab tujuan penelitian ini yaitu tidak adanya informasi apakah langkah-langkah yang telah dicapai dan sejauh mana program itu dijalankan oleh ASEAN.

Kedua, peneliti juga meninjau adanya *Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014* yang disusun Said Khairizky (Afrizal & Khairizky, S. K., 2015). Pada jurnal ini dipaparkan bahwasanya ASEAN dalam memerangi kegiatan kriminal teroris di

Asia Tenggara dari tahun 2011 hingga 2014 adalah membentuk Forum Regional ASEAN dan membentuk *ASEAN Convention On Counter Terrorism*. Namun, pada jurnal ini terdapat kekurangan karena tidak menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri ini dijalankan oleh seluruh negara yang tergabung di ASEAN. Selain itu, jurnal ini juga tidak berisi apakah kebijakan yang dirumuskan mampu memberikan pengaruh terhadap isu terorisme tersebut.

Ketiga, peneliti meninjau artikel dengan judul *Kerjasama ASEAN dalam Menghentikan Aliran Dana Operasional Terorisme Internasional di Asia Tenggara* yang ditulis oleh Maya Damayanti. Pada jurnal ini dipaparkan bagaimana ASEAN melakukan langkah agar organisasi teroris dibersihkan, fasilitas pendukung infrastruktur dibersihkan, fasilitas pendukung kegiatan teroris dibersihkan, termasuk kasus pendanaan teroris, dan penjahat teroris harus diadili (Damayanti, M., 2012). Setelah peneliti meninjau jurnal masih terdapat adanya kekurangan pada jurnal ini karena tidak memiliki sudut pandang lain yang mampu mengevaluasi kinerja kebijakan tersebut guna mengatasi isu terorisme.

Keempat, pada artikel *Implementasi Mekanisme Regional ASEAN Dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara* yang ditulis oleh Anik berisi Implementasi mekanisme anti-terorisme di kawasan ASEAN mengharuskan negara-negara anggota ASEAN untuk mengakui bahwa tidak ada lagi posisi independen tentang isu-isu terkait terorisme dan kejahatan transnasional umum, dan posisi ini sepenuhnya terpisah antar wilayah negara (Yuniarti., 2010). Oleh karena itu, sangat tidak realistis bagi negara-negara ASEAN untuk mencoba memisahkan masalah internal mereka dari masalah negara tetangga. Karena isu terorisme, separatisme, perompakan, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan

manusia, narkoba dan isu-isu lingkungan jelas memiliki konsekuensi negatif yang dapat melampaui kedaulatan nasional. Tetapi, pada jurnal penelitian itu tidak menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut mampu menggerakkan seluruh negara di Asia Tenggara untuk terus memerangi terorisme.

Pada tinjauan pustaka yang terakhir, peneliti memilih untuk mengambil artikel yang berjudul *Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi* yang ditulis oleh Brenda D'Angela Candra Wijaya (Wijaya., 2019). Setelah melakukan tinjauan peneliti mendapati bahwa jurnal ini berfokus kepada bagaimana keamanan dan sekuritisasi, hambatan kerja sama regional, dan relasi terorisme dapat berkembang di Asia Tenggara khususnya terhadap tragedi pertempuran marawi tersebut. Namun, pada jurnal ini tidak membahas bagaimana kelompok yang telah dibentuk oleh ASEAN ikut serta di dalam aktivitas memerangi terorisme di pertempuran marawi tersebut. Sebab, pertempuran marawi menjadi fenomena evolusi isu terorisme di Asia Tenggara yang mampu memberikan dampak yang amat signifikan terhadap keamanan di kawasan.

Meskipun peneliti mendapati banyaknya kelebihan dan tak lepasnya kekurangan pada setiap literatur yang peneliti ambil. Maka, peneliti akan mengembangkan poin-poin dari kelebihan dan kekurangan tersebut sebagai sesuatu yang saling menutupi dan menopang pada penelitian ini.

1.6 Landasan Teori

Untuk membantu dalam proses analisis disini peneliti menggunakan teori fungsionalisme. Teori Fungsionalisme adalah sebuah teori yang memiliki keyakinan bahwa organisasi internasional adalah suatu entitas penting dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut diperjelas pada teori ini yang melihat bahwa dengan diciptakannya organisasi internasional merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan demi membantu negara-negara di dalam suatu Kawasan dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individu terlebih masalah yang saling berkaitan (Cogan, Hurd, & Johnstone., 2016).

David Mitrany merupakan salah satu tokoh fungsionalis yang terkemuka, dimana ia berpendapat bahwa negara tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan manusia jika hanya terbatas pada agen internalnya saja. Mitrany melihat fungsionalis melalui kacamata Fungsional-Sosiologis yang sangat berbeda dengan Politik-Konstitusional yang memiliki konsep federalis. Mitrany lebih mengedepankan konsep keamanan yang berfokus pada kebutuhan dari masyarakat internasional (Alexandrescu., 2007). Oleh sebab itu Mitrany menjelaskan bahwa negara melakukan perluasan dengan membentuk organisasi internasional sebagai suatu solusi untuk melimpahkan tanggung jawab karena tidak bisa secara maksimal melakukan pemenuhan kebutuhan manusia. Mitrany mendefinisikan Fungsionalisme sebagai sebuah usaha yang dilakukan oleh sebuah organisasi tingkat internasional yang memiliki batasan pada fungsinya dan biasanya menggunakan fokusnya untuk melihat bagaimana individu serta kelompok dalam melakukan berbagai macam tindakan. Tindakan tersebut nantinya akan menghasilkan suatu situasi dimana mereka bisa menggunakan situasi tersebut untuk menjalin Kerjasama dalam menghadapi masalah (Mitrany., 1948). Karena memang sejatinya dalam menjaga keamanan agar tetap terus terjaga bukanlah hanya dengan memelihara di tiap-tiap negara di Kawasan, tetapi yang paling tepat adalah dengan

cara menyelaraskan visi serta misi dalam bekerjasama dalam menjaga keamanan (Alexandrescu., 2007).

Terkait dengan peranannya ASEAN telah membuat beberapa langkah yang disusun oleh ASEAN diantaranya yaitu ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) dan the ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT), kedua program ini telah dijalankan oleh ASEAN sejak tahun 2013. Tetapi, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) telah didiskusikan pada tahun 2007 di Cebu Filipina pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12 dan ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism (ACPoA on CT) telah didiskusikan pada forum ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) pada tahun 2008 di Jakarta. Kedua program tersebut menjadi langkah dari ASEAN demi mencegah adanya tindak terorisme atau kejahatan transnasional.

Guna terus menjadi organ yang berguna di Asia Tenggara ASEAN terus melakukan berbagai upaya. Demi mengatasi tindak terorisme ASEAN terus melakukan langkah-langkah lain untuk terus membantu stabilitas Kawasan. Dalam menangani ancaman radikalisis serta ekstrimis ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) pada tahun 2018 dilakukan. AMMTC mengadopsi rencana dari Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism (PoA PCRVE) yang bertujuan melakukan pencegahan dan kebangkitan ancaman terorisme di kawasan. Terdapat 4 poin di dalam konvensi tersebut seperti terus melakukan penegakan hukum, penguatan legislasi nasional negara, promosi deradikalisis, dan promosi Kerjasama antar daerah.

Selanjutnya, peneliti akan menggunakan teori fungsionalisme untuk melakukan analisis terkait peran dari ASEAN dalam mengatasi isu terorisme Asia Tenggara. Selain itu, teori akan digunakan untuk melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan ASEAN dapat mengatasi isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara.

1.7 Argumen Sementara

ASEAN mengambil beberapa Langkah aktif dalam menjawab peranannya dalam menangani masalah terkait isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2017-2020. ASEAN membuat berbagai Langkah dalam mengatasi masalah terorisme dengan membuat program-program seperti pembentukan kelompok Kerjasama ARF (ASEAN Regional Forum), Konvensi ACCT (ASEAN Convention on Counter Terrorism), dan OEI (Our Eye Initiative). Semua program tersebut dibuat ASEAN sebagai sebuah bentuk jawaban dari perannya sebagai lembaga internasional di kawasan Asia Tenggara yang memiliki otoritas tinggi dan tanggung jawab dalam mengatasi berbagai permasalahan kawasan. Apabila dilihat secara keseluruhan hal ini selaras dengan kerangka pemikiran dari Fungsionalisme yang mengemukakan bahwasanya diciptakannya organisasi internasional ialah sebuah hal yang bernilai positif dan akan sangat membantu negara dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara individu dan juga saling berkaitan satu dengan lainnya.

1.8 Metode Penelitian

Data yang digunakan peneliti pada penelitian kali ini didapat dari berbagai jenis sumber mulai dari buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan media massa konvensional. Semua sumber yang disebutkan merupakan sumber yang dapat di pertanggung jawabkan kredibilitasnya:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan dalam bentuk pendapat atau secara tertulis (Lamont., 2015). Penelitian kualitatif biasanya dilakukan melalui pemahaman tentang peristiwa, fenomena, negara, wilayah, organisasi, dan individu tertentu. Jadi, peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk lebih memahami terkait sifat dari peran ASEAN.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu ASEAN dan Objek dari penelitian ini adalah Upaya ASEAN Dalam Menangani upaya kontra terorisme di Kawasan Asia Tenggara isu terorisme.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data sekunder, dimana data didapat melalui buku, jurnal, dan artikel media massa. Metode observasi digunakan dalam pengumpulan data yang didapat melalui riset berbagai Pustaka.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang relevan terkait topik yang dibahas melalui internet. Setelah mendapatkan data yang relevan peneliti merangkum semua data yang didapat dan memasukkannya ke dalam penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

Agar proses penelitian lebih mudah, seluruh isi proposal ini dirangkum dengan kerangka sistematis:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini diawali dengan latar belakang yang membahas terkait bagaimana terorisme bisa menjadi suatu ancaman dan isu yang penting bagi Kawasan Asia Tenggara.

BAB II: Isu Terorisme tahun 2017-2020 dan Tanggapan Negara Anggota ASEAN

Pada bab ini akan menjelaskan terkait isu terorisme yang terjadi di Asia Tenggara serta tanggapan dari negara Asia Tenggara terkait isu terorisme.

BAB III: Upaya Kontra Terorisme ASEAN di Kawasan Asia Tenggara

Bab ini akan menjelaskan ASEAN dalam mengatasi masalah terorisme lewat program dan kesepakatan yang telah diambil. Selain itu bab ini juga akan menjelaskan terkait upaya dalam mengimplementasikan dan evaluasi dari kesepakatan yang telah dibuat.

BAB IV: Penutup

Dalam bab terakhir peneliti akan melakukan pembahasan mengenai kesimpulan dari semua penjelasan pada bab sebelumnya dan menarik kesimpulan serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara

2.1 Sejarah Terorisme di Asia Tenggara

Banyak pakar berpendapat bahwa aksi terorisme di Kawasan Asia Tenggara ditengarai awal mulanya karena peristiwa 9/11. Setelah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat tersebut memang terdapat beberapa aksi terorisme yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara seperti Bom Bali 1 pada tahun 2002 dan ke 2 pada tahun 2005 yang terjadi di Indonesia, lalu peristiwa Bom Yangon tahun 2010 dan 2015 yang terjadi di Myanmar (Bhumantara, 2020). Namun, terdapat fakta lain dibalik aksi terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Terorisme terjadi sebelum peristiwa 9/11 beberapa saat seperti adanya pengeboman yang terjadi di Gedung Orchard Road pada 10 Maret tahun 1965. Peristiwa pengeboman tersebut dilakukan oleh 2 orang warga Indonesia dan membuat adanya perselisihan antara hubungan Indonesia dengan Singapura (Nirmala, 2014). Selain pengeboman Gedung Orchard Road peristiwa terorisme juga terjadi di negara Malaysia sebelum adanya peristiwa 9/11, dimana terjadi sebuah pembajakan pesawat Malaysia Airlines Boeing 737 dengan nomor penerbangan 653 pada 4 Desember tahun 1977 (The Associated Press, 1977). Pada peristiwa pembajakan tersebut pesawat Malaysia Airlines Boeing 737 menyebabkan hilangnya control pesawat dan disusul dengan insiden crash. Pesawat mengalami kerusakan parah pada seluruh aspek dan mengakibatkan para penumpang serta awak kabin yang ikut dalam penerbangan tersebut meninggal dunia seketika Ketika pesawat menyentuh tanah. Rentetan peristiwa tersebut

menjadi sebuah contoh bahwa aksi terorisme di Kawasan Asia Tenggara telah hadir dan eksis bahkan sebelum terjadinya peristiwa 9/11.

Walau begitu peristiwa 9/11 memang menjadi hal penting dari aksi terorisme dunia, karena menjadi suatu alasan merebaknya peristiwa terorisme khususnya di Kawasan Asia Tenggara. Oleh karena banyaknya aksi terorisme yang terjadi membuat negara-negara Asia Tenggara membuat kelompok atau pasukan khusus anti teror demi menjaga keamanan wilayah negaranya seperti Indonesia membuat densus 88 pada tahun 2003, Singapura membuat Naval Diving Unit (NDU) pada tahun 1971, dan Malaysia yang membuat Pasukan Gerak Khas (PGK) pada tahun 1997. Dengan dibuatnya pasukan-pasukan khusus tersebut diharapkan dapat menjadi benteng keamanan yang dapat digunakan dalam mengatasi aksi terorisme.

2.2 Aksi Terorisme di Asia Tenggara

Terorisme menjadi sebuah isu yang amat pelik adanya di dalam negara anggota ASEAN. Hal tersebut kian nampak pada saat kelompok teroris seperti ISIS yang sejatinya banyak melakukan aksi terorisme di Kawasan Timur Tengah mulai meredup. Pada tahun 2014 ISIS menduduki Sebagian besar wilayah-wilayah penting di Kawasan Timur Tengah dan dijadikan sebagai basis kekuatannya mulai menunjukkan adanya kemunduran. Hal demikian terjadi dikarenakan adanya pengambilalihan Kembali wilayah-wilayah tersebut oleh negara pemiliknya yang sebelumnya telah ditundukkan oleh ISIS seperti berhasilnya militer Libya mengambil Kembali wilayah Ibu Kota Sirte, pengambilalihan kekuasaan kota Fulljah kepada pemerintah Irak, dan keberhasilan pasukan Amerika Serikat dalam merebut Kembali wilayah Irak dari kekuasaan ISIS (Amin 2017).

Menurut data yang dikemukakan oleh *Defence Analysts* HIS ISIS telah kehilangan sekitar 28% wilayah kekuasaannya pada awal 2015, dimana itu terjadi dikarenakan meningkatnya serangan balik yang dilakukan oleh pemerintah Irak dan Suriah dalam merebut Kembali wilayahnya. Akibat dari banyaknya kekalahan tersebut ISIS yang merupakan organisasi internasional memiliki kemampuan untuk membangun Kembali pondasi kepemimpinannya mulai mengembangkan jaringannya ke wilayah diluar Timur Tengah.

Dari banyaknya peristiwa kemunduran kekuatan ISIS di negara-negara Kawasan Timur Tengah tersebut membuat adanya penyebaran kekuatan ISIS keluar Kawasan Timur Tengah agar tetap menjaga eksistensinya (Wangke 2017). Asia Tenggara khususnya negara anggota ASEAN menjadi salah satu destinasi dari kelompok teroris. Dipilihnya Asia Tenggara terjadi dikarenakan tingginya tingkat populasi umat muslim di Kawasan Asia Tenggara, dan dengan hal tersebut menjadikan Kawasan Asia Tenggara sebagai destinasi yang relevan disebabkan karena telah adanya kelompok terorisme yang telah eksis terlebih dahulu dan melakukan berbagai aksi. Akibat dari melebarnya kekuasaan kelompok ISIS ke dalam Kawasan Asia Tenggara yang juga didukung oleh kelompok seperti JAD, MIT, serta Abu Sayyaf membuat adanya rangkaian peristiwa terorisme yang terjadi (Wangke 2017).

Ancaman terorisme di Kawasan Asia Tenggara dapat dilihat juga sebagai suatu ancaman yang bersifat trans-nasional dan merupakan hal yang amat sensitif, demikian terjadi akibat dekatnya batas-batas negara yang memudahkan para kelompok terorisme melakukan perpindahan tempat dan perekrutan anggota baru. Oleh karena hal tersebut membuat negara di kawasan tidak bisa secara individu

mengatasi ancaman tersebut dan membutuhkan adanya kerjasama lintas negara di kawasan agar ancaman terorisme dapat diatasi dan tidak menyebar lebih luas lagi.

Sebelum masuknya kelompok terorisme IS (Islamic State) pada tahun 2017 ke dalam Kawasan Asia Tenggara ASEAN sebagai organisasi regional sudah melakukan beberapa rangkaian yang disiapkan bersama para anggotanya untuk menangani kasus terorisme. Pembentukan ARF (ASEAN Regional Forum) dan Sepakat dalam ACCT (ASEAN Convention on Counter Terrorism) merupakan dua rangkaian yang telah dibuat oleh ASEAN sebelum Perang Marawi terjadi dan telah disepakati dengan para negara anggotanya demi memperkuat keamanan Kawasan regional serta menyamakan sudut pandang keamanan. Walau ASEAN telah melakukan beberapa persiapan dalam menjaga regionalnya peristiwa terorisme tetap terjadi dan memaksa ASEAN untuk terus berinovasi dalam menangani masalah terorisme internasional.

2.2.1 Perang Marawi di Filipina

Peristiwa Perang Marawi menjadi salah satu peristiwa yang dapat dikatakan menjadi awal dari berkembangnya kelompok terorisme khususnya ISIS di Asia Tenggara. Perang yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2017 menjadi bukti ancaman terorisme mulai berkembang di Kawasan Asia Tenggara. Perang Marawi sebenarnya hanyalah sebuah peristiwa awal yang dilakukan oleh ISIS untuk memberitahukan bahwa mereka masih memiliki eksistensi yang tinggi di dunia. Serangan kepada Kota Marawi menjadi sebuah suatu peristiwa yang amat special dikarenakan Marawi sejatinya adalah kota yang damai walau di Filipina selatan terdapat beberapa kelompok terorseperti MILF dan Abu Sayyaf

(Wangke 2017). Kota Marawi dipilih sebagai tujuan kelompok ISIS dikarenakan adanya rencana mereka untuk membangun basis kekuatannya. Kota Marawi menjadi destinasi kelompok ISIS untuk melebarkan sayapnya di Kawasan Asia Tenggara karena memiliki beberapa faktor pendukung di dalamnya seperti adanya tingkat populasi muslim yang signifikan dan juga memiliki kekurangan dalam faktor keamanan wilayah yang menjadikan celah terjadinya tindak terorisme. Selain beberapa faktor tersebut terdapat juga faktor lain yang menjadikan Filipina sebagai basis kekuatan kelompok ISIS yaitu karena masih adanya konflik muslim Rohingya yang sedang terjadi dan diprediksi ISIS serta para pendukungnya juga akan bergabung ke dalam kelompok para pemberontak Rohingya.

Sebelum terjadinya peristiwa perang marawi Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Hsien Loong pada tahun 2015 telah mengatakan bahwa memperingati kepada negara Filipina untuk berhati-hati kepada akan adanya serangan terorisme Timur Tengah. Selain pernyataan dari Perdana Menteri Singapura, salah satu badan riset terkait dengan kejahatan politik dan teroris mengatakan bahwa dijadikannya Filipina sebagai pusat basis kekuatan para kelompok terorisme adalah karena banyaknya kelompok terorisme lain di wilayah Filipina yang memberikan dukungan kepada kelompok ISIS, selain itu menurut beberapa analis Marawi disebut sebagai daerah batas kekuatan tentara Filipina yang memiliki kerentanan dalam merespon ancaman teroris (Maresca, 2017).

Marawi adalah sebuah kota yang memiliki populasi muslim sekitar kurang lebih 200.000 jiwa dan menjadi salah satu wilayah yang memiliki populasi muslim paling besar di daerah Otonomi Mindanao Filipina. Kota Marawi

merupakan sebuah wilayah yang memiliki banyak berdiri bangunan-bangunan yang erat dengan muslim seperti masjid, madrasah terbesar di Filipina, hingga kuburan khusus muslim. Semua bangunan yang berdiri di dalam wilayah kota Marawi merupakan sebuah warisan wakaf dari para leluhur (Amnesty Internasional 2017). Perang yang terjadi selama lima bulan ini melibatkan kelompok militer ISIS dengan militer Filipina. Walau pada akhirnya militer Filipina dapat mengamankan Kembali wilayah Marawi, tetapi hal ini tidak dapat dipandang sebagai sebuah keberhasilan mutlak. Pasalnya peristiwa ini tidak hanya melibatkan kelompok jihadis dari filipina saja melainkan dari negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia. Selain itu, peristiwa ini dapat menjadi tombak awal dari eksistensi dan ancaman terorisme yang lebih besar di kemudian hari.

Pecahnya Perang Marawi membuat adanya perhatian dari negara tetangga seperti Indonesia yang mempunyai wilayah teritorial dekat dari wilayah perang. Akibat adanya Perang Marawi Indonesia Bersama Malaysia dan Filipina mulai melakukan penjagaan seperti yang tertera pada salah satu poin Joint Statement ke negara. Ke 3 negara tersebut resmi meluncurkan pasukan MCC (Marine Command Center) pada 19 Juni tahun 2017 di daerah perbatasan laut setiap negara demi menghindari adanya ancaman serta mencegah masuknya kelompok terorisme melalui daerah perbatasan (Mujiono Kurniawan 2017). Penjagaan ketat dilakukan Indonesia karena pemerintah Indonesia melihat bahwa peristiwa tersebut adalah hal yang amat serius. Wujud keseriusan pemerintah Indonesia dapat terlihat dari adanya pengiriman sejumlah pasukan TNI dan juga Polri ke daerah perbatasan Filipina-Indonesia. Pengamanan

perbatasan dilakukan karena perbatasan laut antara Filipina-Indonesia memiliki keamanan yang lemah, serta demi mencegah adanya potensi digunakannya wilayah perbatasan untuk mengirim pasukan dan juga melarikan diri dari para kelompok Maute Group. Selain memperketat wilayah perbatasan laut aparat keamanan Indonesia juga melakukan koordinasi dengan pihak Filipina karena adanya indikasi WNI yang ikut serta menjadi anggota Maute Group dan ikut dalam Perang Marawi (Wangke 2017).

Peristiwa ini menjadi sebuah peristiwa yang amat penting dan special dikarenakan dengan masuknya ISIS ke dalam Kawasan Asia Tenggara dapat menciptakan adanya ancaman baru. Walau ISIS sedang mengalami banyak kekalahan di Timur Tengah tetapi ISIS tetap dapat mengembangkan kekuatannya dan terus melanjutkan apa yang mereka katakan sebagai “Perjuangan/Jihad” karena adanya dukungan dari umat muslim yang berada di Asia Tenggara. Para pengikut ISIS dapat lebih mudah untuk melakukan kontribusi tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke Kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya dukungan teknologi dan menyebabkan banyaknya para pengikut ISIS yang direkrut melalui media sosial (Gunaratna et al. 2017).

Jadi Perang Marawi menjadi sebuah peristiwa baru yang dirasakan oleh Filipina di Kota Marawi yang notabene adalah kota yang damai. Perang Marawi bukanlah sebuah perang terjadi karena masalah internal negara Filipina melainkan Perang yang terjadi dikarenakan masuknya kelompok teroris ke dalam wilayah dan ingin membuat basis kekuatannya. Perang Marawi adalah sebuah serangan pembuka yang dilakukan oleh kelompok ISIS dan para

kelompok pendukungnya. Serangan pembuka dilakukan ISIS demi memberikan info bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang besar dan masih sangat mampu melakukan tindakan radikal lainnya walau sedang mengalami kemunduran di Kawasan Timur Tengah (Wangke 2017).

2.2.2 Bom Surabaya di Indonesia

Peristiwa Bom Surabaya terjadi 2 kali dalam waktu yang berdekatan pertama pada 13 Mei 2018 yang menyerang 3 gereja di Surabaya yaitu Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia, dan Gereja Pentakosta. Kedua, 14 Mei 2018 yang terjadi pada Polrestabes Surabaya dan keduanya adalah bom bunuh diri yang dilakukan oleh 2 keluarga yang berbeda asal usulnya (Tamawiwiy 2019). Aksi bom bunuh diri ini tidak dapat dideteksi dan tak terprediksi oleh aparat keamanan sehingga membuat tidak adanya proses pencegahan yang dilakukan. Dari adanya peristiwa ini membuat ibadah dari para umat Nasrani di beberapa gereja menjadi terganggu, selain itu peristiwa ini dapat membuat adanya keretakan di antara lingkungan masyarakat antar agama karena hal ini merupakan hal yang amat sensitif.

Peristiwa bom bunuh diri ini awalnya terjadi dikarenakan adanya insiden kerusuhan dari penyanderaan yang dilakukan oleh sejumlah narapidana teroris di mako Brimob Surabaya pada tanggal 8, 9, 10 Mei 2018 karena adanya kesalahpahaman di antara narapidana dan aparat yang bertugas dan menjadi awal timbulnya masalah. Dalam peristiwa terdapat beberapa aparat yang menjadi korban penyanderaan seperti Briptu Luar Biasa Anumerta Syukron Fadhli, Iptu Luar Biasa Anumerta Yudi Rospuji Siswanto, dan Briptu Luar

Biasa Anumerta Fandy Setio. Beberapa nama tersebut menjadi sasaran penyanderaan yang dilakukan oleh para narapidana terorisme (Wicaksono 2018). Penyanderaan berlangsung kurang lebih 40 jam yang dilakukan oleh 155 narapidana terorisme, dan setelah 40 jam para narapidana menyerahkan diri kepada aparat. Setelah diselidiki terdapat 40 dalang dari peristiwa tersebut yang ternyata merupakan pengikut dari salah satu kelompok terorisme yaitu JAD (Jamaah Anshorut Tauhid) yang juga merupakan kelompok pendukung ISIS. Dari peristiwa tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa harus ada tata cara khusus dalam menjaga para tahanan narapidana kasus terorisme agar tidak lagi adanya kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kericuhan besar (Wicaksono 2018).

Setelah terjadinya peristiwa kerusuhan di mako Brimob tersebut terjadilah peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan di beberapa daerah di Surabaya. Pada aksi tanggal 13 Mei 2018 tindak terorisme yang menyerang 3 gereja menimbulkan adanya korban yang berjatuhan setidaknya terdapat 11 orang meninggal dunia dan 41 lainnya mendapatkan luka akibat peristiwa bom bunuh diri tersebut. Pada hari berikutnya di tanggal 14 Mei 2018 peristiwa bom bunuh diri Kembali terulang. Kejadian bom bunuh diri ke 2 terjadi pada wilayah Polrestabes Surabaya. Peristiwa bom bunuh diri tersebut diindikasikan memiliki motif yang sama dengan peristiwa bom bunuh diri pertama, dimana kedua peristiwa tersebut dilakukan oleh satu keluarga yaitu bapak, ibu, dan anak (Wicaksono 2018).

Apabila dilihat dari sudut pandang politic-identity dapat disimpulkan bahwa hal seperti terorisme seperti peristiwa diatas merupakan bentuk rasa marah yang

dipicu atas adanya ketidakadilan yang mereka rasakan. Oleh karena ketidakadilan tersebut mereka berpikir bahwa harus adanya sesuatu hal yang membuat terciptanya keadilan di dalam masyarakat, dan oleh karena itulah tindakan bom bunuh diri dilakukan yang bertujuan untuk menimbulkan adanya keseimbangan di dalam masyarakat (Tamawiwiy 2019). Sudut pandang ini memiliki korelasi yang tepat dikarenakan apabila dilihat secara seksama adanya kericuhan yang terjadi di dalam mako Brimob Surabaya akibat kesalahpahaman tindakan aparat kepada narapidana menyebabkan adanya peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh kedua keluarga teroris.

Peristiwa Bom Surabaya menjadi sebuah bukti bahwa tindak terorisme di kawasan Asia Tenggara masih hidup dan terus berkembang karena para kelompok terorisme terus melakukan tindakan terorisme yang mengancam serta hanya berubah motifnya saja seiring dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal demikian harus menjadi sebuah point penting khususnya bagi pemerintah di seluruh negara Kawasan Asia Tenggara terutama negara anggota ASEAN untuk lebih menaruh perhatian kepada ancaman-ancaman terorisme dengan terus berinovasi dalam membangun keamanan di dalam Kawasan. Dalam peristiwa tindakan terorisme membuat adanya pandangan miring terhadap para pemangku kuasa yang bertugas untuk mengamankan serta mengendalikan keamanan Kawasan. Selain itu pandangan miring juga akan berdampak kepada para aparat keamanan karena dengan adanya peristiwa seperti ini membuat kurangnya rasa hormat masyarakat terhadap para aparat keamanan yang memiliki tanggung jawab sebagai mengamankan lingkungan masyarakat.

2.2.3 Bom Jolo di Filipina

Bom Jolo terjadi pada tanggal 27 Januari 2019 bertempat di wilayah gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel yang berada di wilayah pulau Filipina Selatan. Pada saat terjadinya insiden ini dilaporkan bahwa terdapat sedikitnya 22 orang korban jiwa dan 50 diantaranya mengalami luka-luka (Chaidar, Sahrasad, and Tabrani 2019). Insiden ini terjadi pada saat jemaat gereja sedang dalam melakukan ibadah Misa. Pada saat terjadinya insiden terdapat 2 kali ledakan yang terjadi yang pada saat diusut insiden tersebut ternyata dilakukan oleh pasangan suami istri. Ledakan bom pertama kali terjadi dari dalam gereja yang dilakukan oleh wanita yang menyebabkan adanya kerusakan gereja dan property gereja. Setelah ledakan pertama terjadi para jemaat gereja pergi keluar gereja untuk menyelamatkan diri. Tetapi, pada saat para jemaat sedang melarikan diri keluar gereja ledakan kedua terjadi. Ledakan bom kedua terjadi diluar gereja pada saat para jemaat sedang ingin menjauhi gereja dan mengakibatkan jatuhnya sejumlah korban yang berjatuh dan tergeletak di jalan dekat gereja (Chaidar, Sahrasad, and Tabrani 2019).

Peristiwa Bom Jolo adalah sebuah insiden yang amat mengejutkan negara Filipina, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan ciri khas dari teroris dan kasus-kasus terorisme sebelumnya di Filipina. Teroris di Filipina memiliki ciri khas berbeda dalam melakukan tindakan, dimana terorisme di Filipina sangat amat menghormati bagian tubuh, keluarga, dan saling menjaga antar anggota dari hal mematikan. Jadi hal seperti bom bunuh diri dapat dikatakan sebagai hal yang baru untuk negara Filipina dan menjadi insiden yang amat menakutkan bagi masyarakat sipil. Oleh karena kebaruan cara yang digunakan selain membuat

timbulnya rasa takut serta panik di masyarakat juga sebagai sebuah petunjuk kepada masyarakat internasional bahwa ISIS dan para pengikutnya masih memiliki kekuatan serta kemampuan yang hebat dalam melakukan gerakan militan serta mengobarkan api konflik. Peristiwa tersebut adalah sebuah ajang bagi ISIS dan para kelompok pengikutnya dalam menunjukkan kekuatannya di dunia, walau mereka sedang terdesak di Kawasan timur tengah mereka tetap memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar.

Ketakutan yang timbul pada masyarakat Filipina terjadi salah satu alasannya karena pemerintah Filipina memandang kelompok terorisme internasional dengan sebelah mata, terlebih lagi pemerintah Filipina enggan mengakui adanya keberadaan kelompok terorisme yang sudah mengakar pada negaranya dan meremehkan elemen ideologi para kelompok terorisme (Beech and Gutierrez 2019). Oleh karena hal tersebut timbul adanya rasa takut dan juga kurang waspada yang menimbulkan adanya hal yang tak terduga seperti bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok terorisme.

Menurut salah satu badan intelijen yang bernama SITE melaporkan bahwa insiden bom yang terjadi pada gereja Katedral Our Lady of Mount Carmel dilakukan oleh pasangan dari Indonesia (Chaidar, Sahrasad, and Tabrani 2019). Setelah dilakukan penelitian lebih dalam ternyata kedua pelaku merupakan anggota dari kelompok terorisme Abu Sayyaf. Sebelum terjadinya insiden pengeboman tersebut para pelaku mendapatkan doktrin dari kelompok Abu Sayyaf di Surabaya. Setelah didoktrin kedua pelaku lalu diarahkan, mendapatkan pembelajaran, serta melakukan pemantauan sebelum melakukan aksi bom bunuh diri tersebut. Hal ini bukanlah gerakan yang pertama kali

dilakukan oleh kelompok terorisme Abu Sayyaf. kelompok terorisme ini telah melakukan banyak hal lainnya di dalam melakukan gerakan terornya seperti penculikan dan pembunuhan yang telah dilakukan bertahun-tahun dengan menargetkan penduduk lokal dan juga pendatang di Filipina.

Setelah terjadinya bom bunuh diri pada hari minggu tersebut pada keesokan harinya di hari senin Presiden Filipina Rodrigo Duterte langsung mengunjungi lokasi dan mengerahkan para aparat keamanan untuk melakukan olah TKP serta mencari motif dari peristiwa bom bunuh diri tersebut (Beech and Gutierrez 2019). Setelah diidentifikasi mendapatkan sedikitnya 6 orang lainnya dari kelompok teroris Abu Sayyaf. Selain itu aparat keamanan juga mendapatkan hasil lain dari olah tempat kejadian, dimana bom bunuh diri yang terjadi diledakkan dari sebuah ponsel genggam yang dibawa oleh pelaku.

BAB III

Peran Kontra Terorisme ASEAN di Kawasan Asia Tenggara

Maraknya isu radikalisme serta terorisme di berbagai negara Kawasan Asia Tenggara khususnya negara anggota ASEAN menjadi sebuah polemik. Berbagai rentetan kasus terkait terorisme membuat banyak pihak melakukan berbagai upaya serta tindakan demi menjaga keamanan dan perdamaian demi menjaga stabilitas yang kuat bagi Kawasan. Oleh karena faktor tersebut ASEAN sebagai organisasi regional memiliki otoritas serta tanggung jawab dalam memberikan rasa aman serta menjaga perdamaian yang mengharuskannya melakukan suatu hal dalam mengatasi isu terorisme yang terjadi di negara anggotanya. Dengan alasan tersebut ASEAN membuat serangkaian forum kerjasama dalam bidang keamanan seperti ADMM,

AMMTC, ARF, OEI, dan ACCT. Pada forum kerjasama tersebut ASEAN hanya sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara negara anggotanya dengan Negara Mitra. Hal ini terjadi dikarenakan ASEAN memiliki prinsip dasar Non Intervensi, dimana ASEAN hanya memiliki tanggung jawab dan hak dalam membantu negara dalam mencari solusi dan tidak memiliki hak untuk mencampuri urusan dari negara anggotanya (Molthof 2012)r. Dilibatkannya Negara Mitra ASEAN merupakan usaha untuk membentuk rasa solidaritas antar negara dalam menyatukan sudut pandang dalam mengatasi isu terorisme serta diharapkan dapat memperluas pengetahuan negara anggota ASEAN dalam memahami pentingnya keamanan dan pengambilan keputusan pada saat terjadi ancaman. Forum kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN berpegang teguh kepada ke tiga pilarnya yaitu ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) (Yovantra, Afifuddin, and Saragih, n.d.). Diciptakannya forum kerjasama ini diharapkan dapat membuat negara tidak mengalami kebingungan dalam mengambil langkah dalam mengatasi ancaman terorisme. Dikarenakan terbatasnya negara pada solusi pencegahan serta penanganan dan informasi yang dimiliki terkait ancaman terorisme seperti Filipina yang mengalami dampak dari aksi terorisme di marawi dan terkejutnya pemerintah Filipina dengan adanya aksi bom bunuh diri di wilayah Jolo yang pada sejarahnya belum pernah terjadi aksi terorisme dengan cara bom bunuh diri. Oleh karena hal tersebut didalam salah satu forum kerjasama nantinya mempunyai bahasan terkait informasi bagaimana terorisme dalam perencanaan aksi, penyebaran ideologi, dan perekrutan yang dapat menjadi pengetahuan bagi masing-masing negara anggota.

3.1 ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM)

ADMM (ASEAN Defence Ministers Meeting) dikatakan sebagai sebuah sistem diplomasi pertahanan, dimana ini merupakan suatu wadah bagi para negara anggota ASEAN untuk melakukan Kerjasama dalam hal peningkatan keamanan, perdamaian, dan stabilitas di Kawasan melalui dialog serta kerjasama praktis. ADMM pertama kali dicetuskan pada pertemuan ke 10 KTT ASEAN tahun 2004, saat itu seluruh anggota sepakat untuk melakukan pertemuan secara rutin dalam pengembangan sekuritisasi Kawasan. Setelah itu pada tahun 2006 pertama kali pertemuan ADMM dilakukan yang bertempat di Kuala Lumpur Malaysia (Rusfiana 2018). Kerjasama ADMM biasa diikuti oleh antar menteri pertahanan ASEAN masing-masing negara anggota dan juga negara Mitra Dialog seperti Jepang, China, Amerika, Australia, Republik Korea, India, Rusia, dan Selandia Baru. Negara Mitra Dialog menjadi sebuah hal penting dalam ADMM, hal ini adalah sebuah bentuk upaya dari ASEAN demi membentuk kredibilitas dimata global serta meningkatkan hubungan baik antar negara Kawasan. Selain itu, hal demikian menjadi penting karena mengingat ASEAN merupakan sebuah mitra penting bagi negara Mitra Dialog demi mencapai kepentingan dalam hal keamanan (Chalermphanupap 2013). ADMM mengimplementasikan konsep Confidence Building Measures (CBM) di dalam melakukan Kerjasama, dimana hal ini dilakukan dengan harapan akan timbulnya kerangka berpikir para negara anggota ASEAN serta negara mitra dalam melakukan penjagaan keamanan dan stabilitas perdamaian di wilayah-wilayah rawan konflik. Di dalam konsep CBM terdapat beberapa faktor yang mendukung untuk terbentuknya Kerjasama dalam ADMM yaitu seperti Communication measures, Constraint measures, Transparency measures,

Verification measures. Keempat konsep tersebut digunakan dalam Kerjasama dan demi mencapai tujuan besar dalam dibuatnya ADMM yaitu menjaga perdamaian dan memperluas pemahaman akan pentingnya memahami resolusi konflik di ASEAN dan juga memahami terkait pihak-pihak terkait konflik (Gilang and Arfani 2019).

ADMM merupakan sebuah wujud mekanisme yang dibuat oleh ASEAN sebagai organisasi yang mempunyai otoritas tinggi pada negara kawasan dan memiliki peranan untuk dapat bertanggung jawab mengatasi segala bentuk ancaman yang ada. ADMM adalah suatu cara ASEAN untuk secara lebih mendekatkan pengetahuan terkait keamanan kepada negara-negara anggotanya agar terbentuknya rasa saling percaya dan percaya diri dalam peningkatan keamanan wilayah. Selain itu ADMM diciptakan sebagai wujud pemenuhan dari pilar pertama ASEAN yaitu Political Security Community (APSC), bertujuan memastikan para negara anggota ASEAN hidup di dalam tatanan lingkungan yang damai (ASEAN 2020). Demokratis, dan harmonis antara satu sama lain serta dengan dunia luar. APSC diciptakan dengan tujuan terbentuknya ketergantungan antar negara dalam menjalankan kegiatan sekuritisasi Kawasan secara Bersama yang berbasis pada aturan yang berisi nilai serta norma yang di sepakati secara Bersama. Semua hal tersebut tercantum dalam poin tujuan dibentuknya ADMM yaitu bertujuan untuk Memajukan perdamaian dan stabilitas regional lewat rasa saling percaya, memberikan pedoman untuk berdialog dan resolusi konflik, serta bekerjasama dalam hal pertahanan dan keamanan (ASEAN Defence Ministers' Meeting 2017).

Pertemuan ADMM dilakukan secara rutin dalam jangka waktu setahun sekali dan dihadiri oleh sepuluh negara anggota ASEAN serta para negara Mitra Dialog ASEAN. Demi menyalurkan pada rentang waktu penelitian peneliti akan membahas pertemuan ADMM-Plus ke 4 yang digelar pada 24 Oktober tahun 2017 di Filipina. Pada pertemuan tersebut anggota negara ASEAN dan Mitra Dialog membahas beberapa poin-poin penting terkait keamanan seperti Laporan Perkembangan ASEAN, Pengarahan kemajuan ADMM-Plus, Pertukaran pandangan terkait masalah keamanan, Pembaruan keputusan ADMM, dan Penyerahan ketua ADMM kepada negara Singapura. Dari semua rangkaian gelaran acara tersebut mendapatkan beberapa kesepakatan diantaranya yaitu adanya kesepakatan antara semua negara ASEAN dan Mitra Dialog untuk melihat masalah terorisme sebagai masalah seluruh Kawasan dan bukan hanya beberapa negara, lalu para Menteri pertahanan juga menyepakati terkait penanggulangan masalah radikalisme, ekstremisme, dan terorisme dengan cara melalui pendekatan kreatif. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan Kerjasama masyarakat sipil dan Lembaga terkait dengan mempromosikan toleransi dan moderasi guna memerangi gerakan terorisme hingga kepada kasus pendanaan aksi terorisme. Para negara juga menyatakan komitmennya dalam memelihara dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas Kawasan, dimana hal ini dapat dilakukan lewat penyelesaian sengketa secara damai dan tanpa menggunakan kekuatan militer serta mematuhi semua prinsip hukum internasional. Dalam pertemuan ADMM-Plus ke 14 ini semua negara yang terlibat memberikan dukungan kepada negara Filipina dengan menyatakan kesiapannya dalam memberikan bantuan apapun demi memerangi kasus terorisme yang sedang terjadi

di daerah Marawi. Selain memberikan dukungan kepada negara Filipina pertemuan ini juga membahas terkait meningkatnya ketegangan yang terjadi di Korea, dimana semua pihak menyerukan cara penyelesaian konflik secara damai lewat pendekatan hubungan diplomatic yang aman (U.S. Mission 2017).

Pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2018-2020 pertemuan ADMM banyak point diskusi pada penekanan Konflik Laut China Selatan. ADMM selaku forum Kerjasama dalam hal keamanan memberikan penegasan kepada para negara yang terlibat dalam Konflik Laut China Selatan agar tetap menjaga perdamaian dengan tidak melakukan sesuatu hal menyimpang yang dapat melunturkan perdamaian dan mengganggu pembangunan Kawasan. Promosi cara komunikasi dan rasa saling percaya juga dilakukan demi meminimalisir rumitnya situasi serta menjaga stabilitas kawasan. Dalam forum pertemuan ADMM juga menekankan agar semua negara yang terlibat dalam Konflik Laut China Selatan memiliki rasa saling menghormati antar negara terlibat dalam melakukan tindakan dan semua harus didasari sesuai dengan konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa terkait hukum laut (UNCLOS 1982) dan hukum internasional yang berlaku.

Selain penekanan pada perilaku negara dalam menyikapi Konflik Laut China Selatan pada pertemuan ADMM dalam kurun waktu 3 tahun tersebut juga membahas terkait dukungan anggota ADMM-Plus kepada korea serta diskusi terkait dengan program ADMM-Plus Expert Working Group. Di dalam ADMM-Plus EWG dibentuk ke dalam beberapa subjek yaitu dalam penanggulangan terorisme, penanggulangan bencana, keamanan maritime, pemeliharaan perdamaian, pemeliharaan kemanusiaan, militer obat dan keamanan siber. Upaya ini dilakukan ADMM demi tetap menjaga stabilitas perdamaian regional dan negara

mitra serta mengatasi apabila terjadinya suatu tindak terorisme di masa yang akan datang.

ADMM-Plus EWG sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2007 sebagai suatu ruang diskusi untuk membentuk pemahaman yang sama antar negara anggota ADMM-Plus terkait masalah terorisme. Lalu, pada tahun 2017 sampai 2020 subjek tersebut diperluas menjadi lebih banyak. Tujuan dari diperbanyaknya subjek ADMM-Plus EWG demi memperluas cakupan ADMM dalam memberikan kontribusi yang positif bukan dari sektor Kontra Terorisme saja melainkan juga dari segi kemanusiaan. Selain itu, keamanan juga diperluas ke dalam aspek siber. Canggihnya teknologi yang berkembang tiap waktu mempermudah langkah dari tindakan radikalisme dan kejahatan transnasional dalam melakukan aksi.

Dalam pengaplikasiannya kelompok-kelompok kerja ahli tersebut digunakan dalam mendalami sektornya masing-masing lewat Kerjasama yang dilakukan antar negara. Beberapa contoh dalam pengaplikasian kelompok kerja ahli seperti melakukan pelatihan dengan negara anggota ADMM-Plus, melakukan diskusi terkait Work Plan, melakukan aksi pada saat terjadinya masalah dan bekerjasama dalam sharing informasi. Contoh dari kegiatan-kegiatan tersebut seperti yang dilakukan ADMM-Plus EWG on HADR dalam memberikan bantuan saran kepada AMRG (ASEAN Military Ready Group) untuk SOP dan letak dimana mereka harus bersiap agar apabila ada bencana atau masalah terkait kemanusiaan dapat langsung ditangani.

Kerjasama juga dilakukan oleh ADMM-Plus EWG yaitu pada sektor Operasi Pemeliharaan Keamanan (PKO) dan Aksi keamanan Ranjau Manusia (HMA) dengan melakukan kegiatan Field Training Exercise (FTX) tahun 2019

yang bertempat di Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia berlokasi di Sentul, Bogor. Kegiatan ini bertujuan demi meningkatkan kolaborasi antar sesama negara anggota ADMM-Plus dalam mengembangkan kemampuan militer yang akan digunakan sebagai pasukan penjaga perdamaian (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019). Semakin luasnya ancaman yang ada saat ini, dimana terdapat 3 bentuk ancaman dimensi yaitu Ancaman belum nyata atau biasa disebut ancaman tradisional, ancaman nyata seperti ancaman tindakan radikalisme, terorisme, kelompok separatisme, dan bencana alam, dan yang terakhir yaitu adalah ancaman yang dilihat sebagai ancaman paling berbahaya karena mudah untuk disebarkan kepada khalayak luas yaitu ancaman Mindset Radikalisme yang memang menjadi suatu ancaman yang harus diperhatikan. Dapat dikatakan bahwa Kerjasama ini memiliki efektivitas yang baik dalam aksinya. Terdapat pertemuan yang aktif pada setiap tahunnya dan terlihat terdapat progress yang baik dalam mengimplementasikan rencana kerjanya seperti ADMM-Plus EWG yang berjalan baik.

Dapat dikatakan sebagai Kerjasama yang memiliki efektivitas yang baik dan aktif ADMM-Plus belum dapat dikatakan optimal. Karena disisi lain ADMM-Plus belum memberikan adanya aksinya nyata dari mengimplementasikan program-program yang telah dibuat pada situasi krisis. Walau, tujuan ADMM-Plus dalam membangun rasa saling percaya dan mempromosikan perdamaian dengan cara pencegahan namun pada kerjasamanya ADMM hanya melakukan pencegahan lewat pertemuan dan pelatihan-pelatihan saja tanpa ada peran aktif dalam menangani masalah terorisme.

3.2 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) merupakan wadah bagi para anggota ASEAN untuk melaksanakan Kerjasama dalam menangani permasalahan aksi-aksi kriminal lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkoba, pencucian uang, perdagangan manusia, pembajakan di laut, kejahatan ekonomi internasional, penyelundupan senjata, kejahatan dunia maya, dan lainnya. AMMTC memiliki fungsi sebagai forum untuk melakukan pertukaran informasi dari berbagai negara anggota ASEAN, dimana nantinya informasi tersebut digunakan untuk penyelesaian masalah secara bersama (Yovantra, Afifuddin, and Saragih, n.d.). Sama halnya dengan ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) kerjasama ini juga merupakan sebuah wujud dari pilar pertama ASEAN yaitu ASEAN Political-Security Community (APSC). Selain itu AMMTC dalam menjalankan fokusnya dalam memerangi masalah keamanan juga melibatkan negara Mitra Dialog yang terdiri dari 3 negara yaitu Republik Rakyat Tiongkok, Republik Korea, dan Jepang. Negara-negara mitra dialog tersebut memiliki fungsi sama seperti pada Kerjasama ADMM yaitu berguna untuk mencapai tujuan dari AMMTC yaitu memberantas kejahatan transnasional dan juga untuk memperluas pertukaran informasi serta saling berbagi keahlian teknis lewat pelatihan-pelatihan (Yovantra, Afifuddin, and Saragih, n.d.).

Pembentukan AMMTC sebagai forum kerjasama yang berfokus dalam kasus terorisme awalnya bermula dari pembentukan ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) yang merupakan inisiatif Indonesia pada forum ASEAN Senior Legal Official Meeting (ASLOM) tahun 2003. Kemudian, seluruh anggota ASEAN sepakat meratifikasi ACCT menjadi sebuah forum Legal dan

berfungsi sebagai pembangunan kesadaran regional terhadap kejahatan terorisme. Setelah ratifikasi dilakukan, AMMTC jadi berfokus pada ruang lingkup pertahanan dan keamanan negara dalam penanganan isu terorisme (Yovantra, Afifuddin, and Saragih, n.d.). AMMTC menggunakan cara-cara konvensional dalam mengatasi kasus-kasus terorisme, dimana hal ini menjadi sebuah kekurangan dalam penggunaannya dalam menyelesaikan kasus terorisme. Cara konvensional membuat lambannya pergerakan yang dilakukan pada Kerjasama AMMTC karena saat ini para kelompok terorisme sudah mulai berkembang dan menggunakan teknologi terkini dalam melakukan aksinya mulai dari perekrutan hingga komunikasi (Qalbi, Fitrah, and Yulianti 2020).

Perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat membuat adanya kemudahan akses yang dapat digunakan oleh berbagai pihak menjadi sebuah ancaman yang besar bagi Kerjasama AMMTC. Disaat teknologi dan informasi memasuki era 4.0 mulai bermunculan berbagai jenis kejahatan-kejahatan serta ancaman yang baru pula, dimana banyak pihak yang kurang memiliki rasa tanggung jawab yang besar melakukan kejahatan siber (Cyber Crime). Dampak negatif dari adanya perkembangan teknologi membuat jalannya program Kerja dari AMMTC berkembang, dimana pada program kerjanya AMMTC menggunakan cara konvensional yang melihat kejahatan dalam bentuk langsung atau real seperti penanganan ancaman terorisme, perdagangan manusia, dan bentuk kejahatan lainnya. Faktanya perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan metode baru para pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya seperti perdagangan narkoba melalui situs marketplace hingga perekrutan anggota terorisme yang memanfaatkan internet dan media sosial yang berisi propaganda. Perekrutan anggota terorisme

lewat internet dapat dikatakan sebagai sebuah cara kerja yang efektif dalam penggunaannya, dimana hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya anggota baru yang masuk lewat cara kerja tersebut (Prajuji 2017). Pada tahun 2018 Indonesia memberitakan lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) bahwa telah melakukan pemblokiran konten yang mengandung unsur radikalisme dan terorisme sebanyak 10.499 konten, dimana konten tersebut terdapat dari berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, dan situs website (KOMINFO 2019). Oleh alasan tersebut dapat terlihat bahwa cara kerja konvensional yang digunakan oleh AMMTC dalam menangani isu kejahatan transnasional sangatlah tidak relevan dengan keadaan dimana perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju.

Pada meeting AMMTC 2017 ke 11 yang diselenggarakan Di Manila, Filipina Kerjasama ini menegaskan akan lebih fokus lagi dalam penanganan dari adanya pergerakan orang yang tidak teratur di semua wilayah negara ASEAN dan mitra dialog. Hal tersebut dilakukan demi menangani adanya perubahan trend dari para kelompok terorisme dalam merekrut member. Selain sebagai upaya kontra terorisme fokus tersebut dilakukan demi mengatasi adanya kasus human trafficking. Pada pertemuan ini juga membahas terkait pengadopsian deklarasi Manila dan ASEAN dalam upaya melawan munculnya paham-paham radikal dan kejahatan para kelompok teroris serta memerangi kejahatan yang ada dunia maya. Pengadopsian deklarasi tersebut merupakan wujud komitmen dari Kerjasama AMMTC dalam upaya mengatasi seluruh masalah yang mengganggu proses jalannya perdamaian dan stabilitas dari Kawasan. Pada meeting AMMTC ke 13 pada tahun 2019 yang dilaksanakan di Nay Pyi Taw, Myanmar ASEAN dan para

pihak negara mitra dialog secara lebih mendalam fokus-fokus, komitmen, dan program kerja yang telah ada di tahun-tahun sebelumnya. Pada pertemuan ke 13 tersebut Kerjasama AMMTC melakukan pengadopsian Kembali seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ke 13 AMMTC melakukan adopsi pada Rencana Kerja Plan of Action ASEAN. Pengadopsian tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah serta melawan kebangkitan paham radikalisme dan kejahatan transnasional. Lalu, pada pertemuan 13 secara signifikan memperjelas penentangan terhadap perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak.

Pada pertemuan 2018-2019 AMMTC memberikan penekanan kepada peran mereka yang menentang kepada perdagangan manusia yang sedang banyak terjadi khususnya terhadap perempuan dan anak. Hal tersebut ditegaskan pada implementasi AMMTC terhadap Rencana Kerja Perdagangan Orang Bohol 2017-2020. Rencana kerja tersebut nantinya akan dilakukan melalui adanya koordinasi lintas sektor dan pilar yang diharapkan dapat mengatasi masalah kejahatan transnasional tersebut. Rencana kerja ini juga didukung dengan pengadopsian Rencana Aksi ASEAN (PoA) dan Kerjasama AMMTC dengan Korea (AMMTC+ROK) yang bertujuan dalam mencegah dan melawan adanya aksi radikalisme, kejahatan transnasional dan ekstremisme di dalam Kawasan. Selanjutnya pada pertemuan AMMTC tahun 2020 banyak mendiskusikan terkait masalah Covid-19 yang sedang terjadi dan menjadi masalah besar bagi negara anggota ASEAN. Oleh karena hal tersebut pertemuan tahun 2020 diawali dengan komitmen AMMTC untuk tetap menjalin solidaritas dan koordinasi yang erat dalam menangani bencana Covid-19. Selain itu, pada pertemuan kali ini juga membahas terkait peresmian AMMTC+ROK dan membahas adopsi Rencana Aksi ASEAN

yang menjadi Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism (PCRVE).

Salah satu langkah aksi AMMTC dalam mengentaskan aksi kejahatan lintas Kawasan tercantum pada program Rencana Kerja Perdagangan Orang Bohol 2017-2020. Dalam work plan tersebut berisi rencana dari serangkaian aksi yang akan dilakukan dalam Kerjasama AMMTC. Dalam rencana kerja tersebut membahas terkait program-program yang akan dijalankan dalam mengatasi masalah perdagangan orang. Program yang dicanangkan seperti pengembangan lebih lanjut terkait pengamanan di area perbatasan yang banyak aktivitas pergerakan manusianya. Pengembangan dilakukan lewat workshop atau rapat konsultasi dari negara anggota AMMTC serta negara mitra. Pelatihan kepada para penegak hukum dan bada-badan institusi seperti polisi dan para petugas imigrasi serta perbatasan juga dilakukan Pengembangan lain terkait penegakan hukum internasional, Kerjasama dengan beberapa badan internasional dengan tujuan bertukar informasi seperti CSO, INTERPOL, ASEANAPOL, AIIF dan lainnya, lalu melakukan kampanye melalui lokakarya serta media sosial terkait informasi hak para korban dan cara penanganan masalah perdagangan manusia juga dilakukan. Langkah pengembangan tersebut dilakukan demi mengatasi aksi perdagangan manusia yang lebih masif lagi dan demi menjaring para pihak-pihak yang terlibat di dalam aksi perdagangan manusia.

3.3 Our Eyes Initiative (OEI)

Our Eyes Initiative atau biasa disebut OEI merupakan sebuah program Kerjasama yang diinisiasi oleh 3 negara yaitu Indonesia, Filipina, dan Malaysia

pada pertemuan Asean Defence Ministers' Meeting (ADMM) di tahun 2017 pada sesi Terorisme (Parameswaran 2018). Pembahasan terkait Our Eyes Initiative merupakan sebuah respon yang keluar akibat berkembangnya ancaman teroryang dilakukan kelompok ISIS di Kawasan Asia Tenggara. Pembahasan yang dilakukan pada saat itu ialah mengenai fokus ke 3 negara dalam membentuk Kerja sama keamanan dalam lingkup ASEAN yang di adaptasi dari adanya kerja sama Five Eyes negara Amerika Serikat Bersama Australia, Kanada, New Zealand, dan Inggris (Wulolo and Legionosuko 2019). Fokus dari Kerjasama Our Eyes Initiative yaitu pertukaran informasi strategis tiap negara kepada negara lainnya dalam hal penanganan ancaman terorisme yang berkembang. Pertukaran informasi strategis diharapkan akan membuat para negara anggota ASEAN mempunyai prediksi akan situasi dari stabilitas Kawasan serta dapat digunakan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam penanganan isu terorisme (Winarto and Sudirman, n.d.). Pertukaran informasi strategis tersebut nantinya akan dilakukan di tiap tahunnya dalam pertemuan ASEAN Our Eyes yang dihadiri kementerian pertahanan tiap negara anggota ASEAN. Adanya Kerjasama Our Eyes Initiative merupakan suatu harapan yang dapat memberikan proses pengamanan yang maksimal dalam penangan terorisme.

Pada bulan Januari tahun 2018 di sepakati bahwa Kerjasama Our Eyes Initiative mengadakan Soft Launching dan penandatanganan Joint Statement oleh para menteri pertahanan ke-6 negara. Pada pertemuan ke 2 tersebut Menteri pertahanan anggota Our Eyes Initiative juga membahas latar belakang dibentuknya Kerjasama (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2018). Gagasan dari dibuatnya Our Eyes adalah sebagai cara para negara anggota dalam melihat

ancaman yang di masa depan terkait tindak ancaman terorisme dan radikalisme di Kawasan Asia Tenggara. Adanya Kerjasama ini adalah untuk saling menyinergikan serta mengkoordinasikan penanggulangan ancaman terorisme dan radikalisme lewat pertukaran informasi yang strategis. Kemudian, setelah acara Soft Launching pada pertemuan ADMM ke 12 pada tanggal 20 Oktober tahun 2018 para Menteri keamanan 10 negara anggota ASEAN menyetujui dan mengadopsi Kerjasama Our Eyes Initiative (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2018).

Pertemuan ke-3 dilakukan pada 23 Januari tahun 2019 yang bertempat di Semarang, Jawa Tengah. Pada pertemuan ini mendiskusikan terkait mekanisme Kerjasama pertukaran informasi strategis di dalam kerangka Kerjasama Our Eyes Initiative dalam upaya mengatasi perkembangan ancaman dari kelompok terorisme, radikalisme dan ekstremisme di Kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut diskusi melihat adanya kekalahan kelompok terorisme ISIS di negara Irak dan Suriah, dimana hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Kawasan Asia Tenggara yang memungkinkan kelompok ISIS melakukan tindakan (Parameswaran 2020). Aksi perekrutan anggota, perencanaan aksi dan penyebaran ideologi kelompok terorisme menjadi lebih mudah karena dukungan teknologi juga menjadi perhatian dalam Kerjasama. Selain itu, pada pertemuan ADMM ke 13 di Bangkok, Thailand juga membahas terkait inisiatif Our Eyes Initiative (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019). Pada pertemuan itu Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard menegaskan bahwa Kerjasama Our Eyes yang sudah diterima oleh ASEAN berganti nama menjadi ASEAN Our Eyes. Selain ASEAN negara-negara dunia seperti Australia dan Amerika Serikat juga telah mendukung itu, oleh karenanya

pergantian nama harus dilakukan karena sudah bukan sebuah inisiatif milik Indonesia saja namun ASEAN (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019).

Kemudian, pada pertemuan ke-3 tahun 2020 di Palembang, Indonesia. Pertemuan tersebut dihadiri 6 perwakilan menteri keamanan masing-masing negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada pertemuan tersebut ke 6 negara melakukan pembahasan terkait kemunduran negara islam di Timur Tengah dan dampaknya bagi negara Asia Tenggara. Pertemuan tersebut juga membahas terkait kemitraan baru negara-negara tersebut dan cara memerangi terorisme dan paham radikalisme di kawasan (Wulolo and Legionosuko 2019). Pada pertemuan kali ini juga menegaskan Kembali tujuan dari ASEAN Our Eyes dimana pertukaran informasi adalah suatu hal yang penting dalam pengimplementasiannya menangani ancaman terorisme. Kerjasama intelijen dalam hal intelijen juga harus terus dilakukan demi meningkatkan ketahanan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Kawasan.

Kesepakatan dari setiap pertemuan tersebut menjadi sebuah petunjuk bahwasanya negara-negara anggota ASEAN secara sadar telah cukup paham mengenai adanya ancaman terorisme yang sedang berkembang dan bekerjasama merupakan suatu cara yang ampuh dibandingkan negara-negara mengatasinya secara individual. Anggota negara ASEAN secara penuh memilih cara keamanan cooperative daripada keamanan individu, dimana penggunaan konsep keamanan cooperative dalam Kerjasama nantinya akan memudahkan semua pihak dalam menghadapi ancaman-ancaman keamanan yang akan datang dengan mencari solusi Bersama-sama (Winarto and Sudirman, n.d.). Hal ini berkesinambungan pada konsep keamanan cooperative yang dikemukakan oleh Cohen dan Mihalka yang

berpendapat bahwa terdapat 4 pilar di dalamnya atau biasa disebut sebagai Four Rings yaitu Dukungan masing-masing pihak, Pertahanan kolektif, Keamanan kolektif, dan Keamanan Individu. Keamanan cooperative adalah cara yang efektif karena di dalamnya terdapat fokus terhadap keamanan individu yang sama halnya dengan fokus dari dibentuknya Our Eyes Initiative yaitu sebagai upaya menangani ancaman terorisme yang nantinya bisa berdampak negatif kepada masyarakat dari para anggota ASEAN (Winarto and Sudirman, n.d.).

Walau dari konsep yang baik Kerjasama Our Eyes Initiative memiliki kekurangan di dalam penerapannya. Apabila dilihat secara sekilas memanglah Kerjasama ini merupakan hal yang baik dalam pengupayaan negara-negara ASEAN dan Mitra Dialog, tetapi faktanya tidak semudah yang dipikirkan. Seperti yang diketahui bahwa setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing di dalam berbagai hal tak terkecuali dalam hal pengamanan negara (Winarto and Sudirman, n.d.). Bukan hanya bagi negara mitra dialog yang mempunyai perbedaan wilayah dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan, tetapi bagi negara anggota ASEAN juga. Karena akan banyak pertimbangan nantinya dari setiap negara dalam melakukan fokus Dari Kerjasama Our Eyes Initiative yaitu berbagi informasi strategis. Kendala tersebut dapat menjadi sebuah halangan yang dapat membuat Kerjasama berjalan efektif dan semestinya. Tetapi, apabila ASEAN dan para negara Mitra Dialog dapat mendapatkan solusi yang baik untuk semua pihak terlibat mungkin hal tersebut bukanlah sebuah masalah yang dapat menghalangi keefektifan Kerjasama (Winarto and Sudirman, n.d.). Selain itu, ASEAN Our Eyes dapat dikatakan kurang optimal karena dalam data yang ada belum terlihat tindakan secara nyata yang dilakukan ASEAN Our Eyes dalam menangani ancaman

terorisme. Hal ini dimungkinkan terjadi bahwa ASEAN Our Eyes sama seperti Kerjasama lainnya tidak memiliki Joint Defense. Hal ini berimbas pada setiap negara nantinya akan mementingkan dirinya sendiri dengan hanya memberikan bantuan apabila ada negara sekutu mengalami suatu ancaman tindak terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.

3.4 ASEAN Regional Forum (ARF)

ASEAN Regional Forum merupakan sebuah forum yang disepakati dan dibentuk pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conference ke 26 pada 23-25 Juli tahun 1993. Kemudian berlanjut pertemuan pertama negara-negara anggota ARF pada 25 Juli tahun 1994 di Bangkok Thailand (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019). Tujuan dibentuknya ARF adalah sebagai forum yang mendorong adanya dialog serta konsultasi terkait isu politik dan keamanan yang menjadi fokus Bersama negara-negara anggota ARF. Fokus dari ARF adalah terkait dengan pemeliharaan perdamaian, keamanan dari ancaman luar, dan Kerjasama antar Kawasan. Selain itu, ARF juga memberikan kontribusi yang aktif dan signifikan terhadap upaya pembangunan kepercayaan melalui diplomasi preventif kepada Kawasan Asia Pasifik. Jadi ARF merupakan sebuah forum yang memainkan peran dalam hal pencegahan munculnya konflik dan meningkatnya suatu konflik. ARF juga dapat berperan sebagai forum yang dapat menghindari penggunaan kekerasan dan kekuatan di dalam konflik. Tetapi ARF belum dapat menjadi sara dalam penyelesaian konflik, karena ARF di desain sebagai forum untuk berdialog dan berkonsultasi bukan didesain sebagai forum

yang dapat melakukan penyelesaian (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2019)

Peserta ARF sama seperti forum Kerjasama lainnya yaitu terdapat negara anggota ASEAN dan juga mitra dialog yang berasal dari luar Kawasan Asia tenggara. Anggota-anggota ARF yaitu Australia, Kamboja, Brunei Darussalam, Bangladesh, Kanada, Cina, Republik Rakyat Demokratik Korea, Uni Eropa, India, Indonesia, Jepang, Laos, Myanmar, Mongolia, Malaysia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Vietnam, Republik Korea, Rusia, Sri Lanka, Singapura, Thailand, Timor-Leste, Filipina, dan Amerika Serikat.

Dalam penerapannya ARF yang merupakan sebuah forum dialog memiliki beberapa cara dalam membuat forum berjalan aman dan baik bagi semua anggota. Dalam Kerjasama ARF rasa saling percaya dibangun dari adanya kegiatan koperasi dan dibuatnya suasana untuk terbiasa dalam melakukan dialog dan konsultasi dalam membahas masalah politik dan keamanan. Sama seperti Kerjasama lainnya transparansi merupakan hal yang amat penting dalam lingkup kerjasamanya. ARF melakukan promosi pertukaran informasi terkait dengan kebijakan keamanan dan pertahanan melalui publikasi buku. Transparansi tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari rasa saling curiga antar anggota serta meningkatkan rasa percaya satu sama lain (ASEAN Regional Forum 2003).

Sebagai sebuah forum diskusi yang berfokus pada tantangan keamanan dan pertahanan hal tersebut tercermin pada forum-forum pertemuan yang dilakukan. Merangkum dari forum pertemuan yang dilakukan pada tahun 2017-2020 banyak mendiskusikan terkait dengan implementasi dari Rencana Aksi Hanoi, pencegahan Violent Extremism Conducive to Terrorism (VECT), kerjasama keamanan

maritime, pentingnya keamanan dan penggunaan teknologi TIK, dan non-proliferasi nuklir (ASEAN Regional Forum 2020). Point-point tersebut merupakan point yang sering dibahas dalam pertemuan ARF dalam kurun 4 tahun kebelakang. Rencana Aksi Hanoi adalah sebuah rencana yang berisi visi-misi ARF dalam jangka Panjang dalam hal ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan menjaga perdamaian Kawasan dari ancaman kejahatan. Dalam subjek menjaga perdamaian dilakukan lewat memperkuat rasa solidaritas dan kekompakan antar negara anggota dan mempromosikan bahwa Asia Tenggara sebagai Kawasan zona netral dan damai. Selain itu, program-program Kerjasama bilateral juga digaungkan demi terciptanya keamanan di kawasan. Selain Rencana Aksi Hanoi ARF juga mempromosikan aksi pencegahan Violent Extremism Conducive to Terrorism (VECT) (ASEAN Regional Forum 2020). Di dalamnya membahas terkait rencana ARF dalam upaya mengatasi terorisme yang salah satunya dilakukan lewat pendekatan seluruh pihak untuk berpartisipasi dan berkolaborasi yang aktif dari semua pihak untuk bekerjasama dengan sektor swasta bahkan masyarakat sipil dalam mencegah, menghambat, dan melemahkan ancaman terorisme. Lalu, ARF menegaskan bahwa terorisme tidak dapat disangkut pautkan dengan agama dan kebangsaan. Walau tegas dalam mengatasi ancaman terorisme ARF tetap memberi penekanan terhadap seluruh negara anggota dan negara mitra untuk tetap patuh terhadap Hukum Internasional dan melindungi Hak Asasi Manusia di dalam melakukan aksi pencegahan. Promosi Non-proliferasi Nuklir dilakukan oleh ARF kepada seluruh anggotanya sebagai suatu langkah menciptakan situasi yang aman serta kondusif dan jauh dari adanya konflik. Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa ARF memiliki fokus yang baik dalam membangun keamanan di kawasan Asia Tenggara

serta optimal dalam menjawab permasalahan yang ada (ASEAN Regional Forum 2020).

3.5 ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)

Semua negara yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN telah menyepakati konvensi dalam melawan terorisme ini pada tahun 2007 dan telah dilakukan ratifikasi pada tahun 2013. Kasus terorisme yang terjadi pada periode tahun 2000-2007 adalah alasan yang membuat dibentuknya ASEAN Convention on Counter Terrorism. Di dalam konvensi ACCT mengandung prinsip-prinsip hukum internasional dan resolusi PBB yang mana kedua hal tersebut berisi terkait dengan upaya melawan terorisme yang berkembang (Hartono, n.d.).

Pada pertemuan AMMTC tahun 2017 pembahasan terkait program kerja ACCT untuk kedepannya Kembali dibahas. Pada pertemuan tersebut terdapat beberapa rencana aksi yang nantinya akan diterapkan pada program ACCT yaitu seperti peningkatan Kerjasama antar penegak hukum dan badan intelijen negara anggota ASEAN dalam pencegahan dan menekan kelompok terorisme dengan tujuan agar dapat menghalangi rencana aksi teror yang akan dilakukan serta membawa para terdakwa terorisme ke dalam jalur hukum (ASEAN 2017). Lalu, demi menjaga keamanan Kawasan serta melindungi seluruh masyarakat negara anggota ASEAN program kerja pencegahan tindak terorisme juga diperdalam dengan rencana mengatasi kelompok terorisme hingga ke akar masalahnya lewat Kerjasama negara anggota ASEAN.

Oleh karena tanggung jawab sebenarnya dalam melawan terorisme berada pada masing-masing negara anggota ASEAN, para negara harus menambahkan

penanganan terorisme ke dalam rencana nasional negara (ASEAN 2017). Setiap negara juga diharuskan melakukan peningkatan Kerjasama dengan cara memfasilitasi semua badan-badan yang memiliki otoritas dalam penanggulangan masalah terorisme seperti membuat fasilitas penegakan hukum yang lebih layak dengan pembuatan akademi dan tempat yang memadai. Selain itu, Kerjasama dalam hal peningkatan pelatihan antar negara juga dianjurkan kepada para pemegang otoritas keamanan setiap negara ASEAN dengan tujuan dapat melakukan kegiatan pemberantasan kasus terorisme lebih baik lagi (ASEAN 2017).

3.6 Analisis

Apabila dilihat dari semua Kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN dan Mitra Dialog dapat disimpulkan bahwa ASEAN telah berusaha dan sadar akan adanya ancaman terorisme yang semakin berkembang di Kawasan Asia Tenggara. Semua Kerjasama memiliki fokus yang sama yaitu mencoba melakukan upaya keamanan dan pertahanan Kawasan dari ancaman terorisme. Karena memang negara tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan manusianya dalam semua sektor apabila hanya terbatas pada pihak dalam negerinya saja karena beberapa sektor seperti keamanan dalam terorisme dapat berkaitan antar negara lain karena dekatnya batas-batas negara. adHal ini selaras dengan teori fungsionalisme bahwa organisasi kawasan memiliki tanggung jawab untuk memberikan solusi dan bantuan terhadap masalah yang sedang dihadapi Kawasan. Program seperti ADMM Plus EWG yang melakukan pelatihan bersama antara negara anggota ASEAN dan Negara Mitra di Sentul, Bogor pada tahun 2019. Pelatihan bersama dilakukan ADMM-PLUS EWG on Peacekeeping Operations (PKO) dan Humanitarian Mine

Action (HMA) yang bertujuan peningkatan kemampuan militer dalam mempersiapkan kerjasnya kontribusi mereka untuk menjadi pasukan penjaga perdamaian negara ADMM Plus (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 2019). Selain pelatihan bersama ADMM Plus terdapat juga Rencana Aksi Hanoi pada forum ARF yang bertujuan menjaga perdamaian negara anggota ARF lewat kolaborasi semua pihak hingga pihak swasta. Lalu, Rencana Kerja Perdagangan orang bohol tahun 2017-2020 yang bertujuan peningkatan penjagaan di batas-batas negara dengan cara meningkatkan skill pihak-pihak bersangkutan seperti petugas imigrasi dan bekerjasama dengan badan internasional seperti CSO, INTERPOL, dan ASEANAPOL. Semua hal tersebut menjadi sebuah langkah pengimplementasian upaya kontraterorisme dari forum-forum yang diinisiasi oleh ASEAN.

Pada faktanya memang forum Kerjasama dan upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN Bersama negara Mitra Dialog ASEAN dilihat berjalan dengan baik hal tersebut dapat terlihat dari data dibawah yaitu:

Tabel 1.1 Indeks Kasus Terorisme Negara Filipina, Malaysia, Laos pada Tahun 2017-2020

	2017	2018	2019	2020
Philipna	7,059	7,174	7,169	7,074
Laos	3,69	3,098	2,522	1,968
Malaysia	2,945	2,985	3,064	2,907

Source: (Vision of Humanity 2017)

Dapat dilihat dari data ke 3 negara kasus terorisme memang masih kerap terjadi dan memiliki intensitas yang tinggi pada tahun 2018-2019, tetapi pada tahun

2020 jumlah rata-ratanya menurun apabila dibandingkan tahun 2017. Disimpulkan bahwa program yang diimplementasikan dari forum-forum Kerjasama seperti pelatihan bersama ADMM Plus EWG, Rencana Kerja Hanoi, sharing informasi strategis ASEAN Our Eyes, dan lainnya dapat dikatakan membantu negara dalam menangani kasus terorisme walau tidak semua negara mengalami penurunan yang signifikan. Apabila dilihat dari sudut pandang Functionalism ASEAN dapat melakukan tugasnya sebagai organisasi internasional yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan bantuan dalam upaya penanganan suatu kasus atau masalah negara anggota. Walau memang program dari kerjasama yang telah dilakukan belum dapat mengatasi terorisme secara maksimal, karena beberapa dari forum Kerjasama hanya berperan sebagai dialog dan konsultasi.

BAB IV

2.1 Kesimpulan

Langkah ASEAN dalam menjalankan perannya sebagai organisasi yang membawahi banyak negara di Kawasan Asia Tenggara dapat dinilai berhasil dalam upaya Kontra Terorisme pada tahun 2017-2020. ASEAN yang notabene sebagai organisasi regional telah melakukan serangkaian upaya dalam Kontra Terorisme. Walau memang ASEAN tidak memberikan solusi secara langsung kepada negara anggotanya, tetapi dalam pemenuhan tanggung jawabnya sebagai organisasi regional ASEAN dapat membantu negara-negara anggotanya dalam memberikan wadah untuk mereka melakukan sosialisasi dalam bentuk Kerjasama antar wilayah. Terlebih lagi ASEAN dapat membantu negara anggotanya dalam mendapatkan mitra dialog dari luar Kawasan yang akan sangat membantu dalam upaya melawan aksi-aksi terorisme. Serangkaian Kerjasama yang dilakukan seperti ADMM, AMMTC, Our Eyes Initiative, ARF, dan ACCT merupakan suatu bentuk peran ASEAN dalam membantu negara anggotanya. Lewat forum tersebut nantinya negara anggota dapat melakukan Kerjasama dan membentuk sebuah langkah dalam upaya Kontra Terorisme. Karena pada dasarnya ASEAN hanyalah sebuah organisasi yang dapat membantu para anggotanya dan tidak memiliki hak untuk melakukan ataupun memaksa anggotanya untuk melakukan sesuatu apabila tidak sesuai dengan apa yang diinginkan negara anggotanya. Penarikan kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa ASEAN dikatakan memiliki peran yang baik serta optimal dalam membantu Kawasan Asia Tenggara khususnya para negara anggotanya dalam upaya Kontra Terorisme.

Walau optimal dalam perannya ASEAN tetap memiliki kekurangan di dalamnya. Dimana terdapat beberapa program dari Kerjasama yang dilakukan tidak memiliki Work Report yang lengkap. Lalu, dalam pertemuan-pertemuan Kerjasamanya banyak membahas terkait titik fokus yang itu-itu saja seperti terkait Konflik Laut China Selatan yang banyak dibahas di berbagai forum, selain itu tidak adanya penjelasan secara gamblang terkait kemajuan apa yang sebenarnya terjadi dalam program yang dijalankan hal ini dapat dikatakan bahwa ASEAN kurang terbuka dalam pencapaian dan program-program yang dijalankan. Diharapkan untuk kedepannya ASEAN memiliki keterbukaan yang lebih agar khalayak lebih dapat mengetahui progress dari ASEAN itu sendiri.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dari penelitian kali ini. Dimana kekurangan yang terjadi dikarenakan terdapatnya kendala peneliti dalam mencari data sedetail mungkin terkait informasi dari setiap forum-forum kerjasama yang dibahas. Keterbatasan data dikarenakan memang pada tahun 2017 teknologi belum semaju saat ini. Dimana tidak semua informasi detail dapat diakses untuk dijadikan referensi bagi peneliti.

Keterbatasan terkait data terdapat pada beberapa program dari Kerjasama yang dilakukan tidak memiliki Work Report yang lengkap, selain itu tidak adanya penjelasan secara gamblang di website official dari forum kerjasama terkait kemajuan apa yang sebenarnya terjadi dalam program yang dijalankan. Oleh karena hal tersebut diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan data yang lebih lengkap dan keterbukaan forum kerjasama lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexandrescu, Mihai. 2007. "David Mitrany: From Federalism to Functionalism" 16 (1): 15.
- Amin, Khoirul. 2017. "ISIS Menuju Asia Tenggara: Ancaman dan Kerja Sama Keamanan Kawasan dalam Menghadapi Peningkatan Ekspansi ISIS." *Jurnal Hubungan Internasional* 6 (2). <https://doi.org/10.18196/hi.62117>.
- Amnesty Internasional. 2017. "'The Battle of Marawi' Death and Destruction In The Philippines." Amnesty International.
- ASEAN Regional Forum. 2020. "CHAIRMAN'S STATEMENT OF THE 27th ASEAN REGIONAL FORUM HANOI, 12 SEPTEMBER 2020." ASEAN. <https://asean.org/chairmans-statement-of-the-27th-asean-regional-forum/>.
- Bangun, Budi Hermawan. 2019. "Pengaruh dari Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme." *Pandecta: Research Law Journal* 14 (1): 1–12.
- Bangun, Budi Hermawan. 2019. "Pengaruh dari Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme." *Pandecta: Research Law Journal* 14 (1): 1–12. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v14i1.17777>.
- Beech, Hannah, and Jason Gutierrez. 2019. "ISIS Bombing of Cathedral in Philippines Shows Group's Reach Into Asia." *The New York Times*, 6.
- Bhumantara, Muhammad Rafly. 2020. "Perkembangan Terorisme di Asia Tenggara dan Sudut Pandang serta Upaya Negara-negara ASEAN dalam Memberantas Terorisme," March 16, 2020.

<https://www.kompasiana.com/raflybhimantara/5e6fa9c0097f36583f5122b3/perkembangan-terorisme-di-asia-tenggara-dan-sudut-pandang-serta-upaya-negara-negara-asean-dalam-memberantas-terorisme?page=all#section1>.

Chaidar, Al, Herdi Sahrasad, and Dedy Tabrani. 2019. "THE BATIH FAMILY AS A WEAPON: ANALYSIS OF THE JOLO CATHEDRAL BOMB, PHILIPPINES." *Aceh Anthropological Journal* 3 (2): 114. <https://doi.org/10.29103/aaj.v3i2.2776>.

Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan internasional di Asia Tenggara: teropong terhadap dinamika, realitas, dan masa depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

CNN Indonesia. 2018. "Lima Pasukan Elite Anti-Teror di Indonesia." *CNN Indonesia*, May 15, 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180514202206-20-298176/lima-pasukan-elite-anti-teror-di-indonesia>.

Cogan, Jacob Katz, Ian Hurd, and Ian Johnstone, eds. 2016. *The Oxford Handbook of International Organizations*. First edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Gunaratna, Rohan, Nur Azlin Mohamed Yasin, Muhammad Haniff Hassan, and Mahfuh Halimi. 2017. "Marawi: A Game Changer in Terrorism in Asia" 9 (7): 37.

Haas, Michael. 1965. "A Functional Approach to International Organization." *The Journal of Politics* 27 (3): 498–517.

Junaid, Hamzah. 2013. "Pergerakan Kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam" 8 (2): 118–35.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2018. "Soft Launching 'Our Eyes', Indonesia dan Lima Negara ASEAN Kerja sama Pertukaran Informasi Strategis." *Soft Launching "Our Eyes", Indonesia dan Lima Negara ASEAN Kerja sama Pertukaran Informasi Strategis* (blog). January 25, 2018. <https://www.kemhan.go.id/2018/01/25/soft-launching-our-eyes-indonesia-dan-lima-negara-asean-kerja-sama-pertukaran-informasi-strategis.html>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2019. "Tangkal Terorisme dan Radikalisme, 10 Negara ASEAN Bahas Mekanisme Kerjasama Pertukaran Informasi Strategis 'Our Eyes.'" *Tangkal Terorisme dan Radikalisme, 10 Negara ASEAN Bahas Mekanisme Kerjasama Pertukaran Informasi Strategis "Our Eyes"* (blog). January 23, 2019. <https://www.kemhan.go.id/2019/01/23/tangkal-terorisme-dan-radikalisme-sepuluh-negara-asean-bahas-mekanisme-kerjasama-pertukaran-informasi-strategis-dalam-kerangka-our-eyes.html>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020. "Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Membuka Secara Resmi Kegiatan 'ASEAN Our Eyes' Ketiga di Palembang." *Dirkersin Ditjen Strahan Kemhan Membuka Secara Resmi Kegiatan "ASEAN Our Eyes" Ketiga di Palembang* (blog). March 4, 2020. <https://www.kemhan.go.id/2020/03/04/dirkersin-ditjen-strahan-kemhan-membuka-secara-resmi-kegiatan-asean-our-eyes-ketiga-di-palembang.html>.

Khairizky, Said. 2015. "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014" 2 (2): 9.

Khairizky, Said. 2015. "PERAN ASEAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA

TAHUN 2011-2014” 2 (2): 9.

Lamont, Christopher. 2015. *Research Methods in International Relations*. 1st ed.

London: SAGE Publications Ltd.

Maresca, Thomas. 2017. “ISIS Expands Foothold in Southeast Asia with Philippine

Siege.” *10News*, June 10, 2017. <https://www.wbir.com/article/news/nation-now/isis-expands-foothold-in-southeast-asia-with-philippine-siege/465-e8d444f4-4571-4e8c-b247-8b997fcb6f4f>.

Mitrany, David. 1948. “The Functional Approach to World Organization.” *Oxford*

University Press 24 (3): 350–63.

Mujiono Kurniawan, Dadang Ilham. 2017. “Multilateral Cooperation Between

Indonesia Malaysia and the Philippines in Terms of Securing the Southeast Asia Region Post Marawi Attack” VIII (October): 293.

Nainggolan, Poltak Partogi. 2018. “Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara, Sekadar

Wacana atau Realitas?” *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 8 (2).

Namora, Giuliani Agustha, Reni Windiani, and Satwika Paramasatya. 2016. “Peran

ASEAN Convention on Counter Terrorism Dalam Penanganan Terorisme Di Filipina Periode 2011-2013.” *Journal of International Relations* 2 (4): 170–79.

Nirmala, M. 2014. “MacDonald House Attack Still Strikes Home S’pore.” *The*

Jakarta Post, February 13, 2014.

<https://www.thejakartapost.com/news/2014/02/13/macdonald-house-attack-still-strikes-home-spore.html>.

- Parameswaran, Prashanth. 2020. "ASEAN Our Eyes Meeting Spotlights Counterterrorism Cooperation." *ASEAN Our Eyes Meeting Spotlights Counterterrorism Cooperation* (blog). March 10, 2020. <https://thediplomat.com/2020/03/asean-our-eyes-meeting-spotlights-counterterrorism-cooperation/>.
- Popoviciu, Adrian-Claudiu. 2010. "David Mitrany and Functionalism. The Beginnings of Functionalism" 12 (1): 162–72.
- Rakarianda, M Luthfi, Achmad Romson, and Usdawadi Usdawadi. 2019. "Implementasi ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara."
- Robert, Jervis. 1978. "Cooperation Under The Security Dilemma." *Cambridge University Press* 30 (2): 167–214.
- Romadhona, Januar. 2019. "PENGARUH PERISTIWA BOM BUNUH DIRI 13 MEI 2018 DI SURABAYA TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BEI" 08 (03): 11.
- Rosenboim, Or. 2013. "From the Private to the Public and Back Again: The International Thought of David Mitrany, 1940-1949," 1–25.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2012. *Terorisme di Indonesia Dalam Tinjauan Psikologi*. Banten: Pustaka Alvabet.
- Silber, Mitchell.D. 2012. *The Al Qaeda Factor: Plots Against the West*. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
- Tagoranao, Dr Mariam Saidona, and Dr Alizaman D Gamon. 2017. "The Post-War Reconstruction of Waqf Properties in Marawi City: Prospect and

Challenges,” 8.

Tamawiwiy, August Corneles. 2019. “Bom Surabaya 2018: Terorisme dan Kekerasan Atas Nama Agama.” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 4 (2): 175.
<https://doi.org/10.21460/gema.2019.42.443>.

The Associated Press. 1977. “Hijacked Jet Crashes in Malaysia; All 100 Aboard Are Feared Dead.” *The New York Times*, May 12, 1977.

Vision of Humanity. 2017. “Overall Terrorism Index Score.” 2017.
<https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#/>.

Wangke, Humphrey. 2017. “ANTISIPASI INDONESIA TERHADAP GERAKAN ISIS DI MARAWI” 9 (12): 4.

Wicaksono, Hendro. 2018. “Analisis Kriminologis: Serangan Bom Bunuh Diri di Surabaya” 2 (2): 14.

Wijaya, Brenda D’Angela Candra. 2019. “Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi,” 1–22.

Wijaya, Brenda D’Angela Candra. 2019. “Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi,” 1–22.

Winarto, Prisilla Octaviani, and Arfin Sudirman. 2021. “Penanggulangan Terorisme di ASEAN Melalui Our Eyes Initiatives: Studi Mengenai Cooperative Security” 8 (1): 71–86.

Winarto, Prisilla Octaviani, and Arfin Sudirman. 2021. “Penanggulangan Terorisme di ASEAN Melalui Our Eyes Initiatives: Studi Mengenai Cooperative Security” 8 (1): 16.

Wolf, Peter. 1973. “International Organization and Attitude Change: A Re–

Examination of the Functionalist Approach.” *International Organization* 27
(3): 347–71.

Yaoren, Kenneth Yeo. 2021. “Philippines’ Foreign Fighter Phenomenon” 11 (7): 7.

Yuniarti, Anik. 2010. “Implementasi Mekanisme Regional ASEAN Dalam
Penanggulangan Masalah Terorisme Di Asia” 2 (1): 23–40.